

**PEMERINTAH
KABUPATEN
BARRU**



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami dapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik hingga saat ini. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, kami selaku Bupati melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Bupati Barru sebagaimana amanat dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2024. Selain itu Laporan ini



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

Dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2024 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan. Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Barru, 26 Maret 2025

BUPATI BARRU



INA KARTIKA SARI



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Dasar Hukum	2
b. Kondisi Geografis Daerah	4
c. Jumlah Penduduk	6
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7
e. Jumlah Penduduk Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	8
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	14
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	14
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	19
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	23
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	34
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	49
1.1.3.1 Dasar Hukum	50
1.1.3.2 Kebijakan Umum	52
BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	79
2.1 Capaian Kinerja Makro	79



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	79
2.1.2 Angka Kemiskinan	84
2.1.3 Angka Pengangguran	85
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	86
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	87
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini	88
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
Pemerintahan.....	90
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	92
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan	98
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	100
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	100
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan	
Target Perjanjian Kinerja	101
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan	
Tahun Sebelumnya	104
2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan	
Target Dalam Pembangunan Jangka Panjang	106
2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
Dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang Telah	
Dicapai.....	108

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN111

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan112



3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	113
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	114
3.3.1 Target Kinerja	114
3.3.2 Realisasi	115
3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang Ditugaskan Kepada Daerah kabupaten/ Kota	117
3.5 Permasalahan dan Kendala	117
3.6 Sasaran dan Tidak Lanjut	118
BAB IV PENCAPAIAN SPM	120
4.1 Bidang urusan Pendidikan.....	120
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	120
4.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pendidikan	120
4.1.3 Hasil Capaian Urusan Pendidikan	122
4.1.4 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	123
4.1.5 Dukungan Personil Urusan Pendidikan	124
4.1.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan	125
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	126
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	126
4.2.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Kesehatan	127
4.2.3 Hasil Capaian Urusan Kesehatan	138
4.2.4 Anggaran Urusan Kesehatan	144



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

4.2.5 Dukungan Personal Urusan Kesehatan	144
4.2.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan	145
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	145
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	145
4.3.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pekerjaan Umum	146
4.3.3 Hasil Capaian Urusan Pekerjaan Umum	146
4.3.4 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum.....	147
4.3.5 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum	147
4.3.6 Kendala Permasalahn dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	148
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	149
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	149
4.4.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	150
4.4.3 Hasil Capaian Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	150
4.4.4 Anggaran Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman.....	152
4.4.5 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	152
4.4.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	153



4.5 Bidang Urusan Trantibumlinmas	154
4.5.1 Urusan Satpol PP dan Damkar	154
4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Satpol PP dan Damkar	154
4.5.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Satpol PP dan Damkar.....	154
4.5.1.3 Hasil Capaian Urusan Satpol PP dan Damkar	155
4.5.1.4 Anggaran Urusan Satpol PP dan Damkar	157
4.5.1.5 Dukungan Personil Urusan Satpol PP dan Damkar	158
4.5.1.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Satpol PP dan Damkar	158
4.5.2 Urusan BPBD	159
4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan BPBD	159
4.5.2.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan BPBD	159
4.5.2.3 Hasil Capaian Urusan BPBD	160
4.5.2.4 Anggaran Urusan BPBD	162
4.5.2.5 Dukungan Personil Urusan BPBD	162
4.5.2.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan BPBD	163
4.6 Urusan Sosial	164
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial.....	164
4.6.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Urusan Sosial	165
4.6.3 Hasil Capaian Urusan Sosial	166
4.6.4 Anggaran Urusan Sosial	167
4.6.5 Dukungan Personil Urusan Sosial	167
4.6.6 Kendala Permasalahan dan Solusi	
Urusan Sosial	168
4.7 Program dan Kegiatan	169
4.7.1 Program dan Kegiatan urusan Pendidikan	169
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	172
4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum...	174
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Permukiman dan	
Perumahan Rakyat	175
4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	
Perlindungan Masyarakat	177
4.7.6 Bidang Urusan Sosial.....	182
BAB V PENUTUP	184



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Luas Daerah dan Pembagian wilayah Administratif	
Kabupaten Barru	5
TABEL 1.2 Jumlah Penduduk Tahun 2024	7
TABEL 1.3 Jumlah Kecamatan	8
TABEL 1.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
TABEL 1.5 Penjelasan Visi Misi	21
TABEL 1.6 RPJMD 2021-2026	25
TABEL 1.7 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	
Kabupaten Barru Tahun 2024	35
TABEL 1.8 Target Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini	
Berdasarkan Permendagri No 59 Tahun 2021	54
TABEL 1.9 Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan	
Permendagri No 59 Tahun 2021	55
TABEL 1.10 Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Berdasarkan	
Permendagri No 59 Tahun 2021	58
TABEL 1.11 Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan	
Berdasarkan Permendagri N0 59 Tahun 2021	58
TABEL 1.12 Target Pencapaian SPm Satpol PP Damkar dan	
Penyelamatan	75
TABEL 1.13 Target Pencapaian SPM Badan Penanggulangan	
Bencana Daerah.....	76
TABEL 1.14 Target Pencapaian SPM	77
TABEL 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Barru	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Tahun 2023-2024	79
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	92
TABEL 2.3 Indikator Kinerja Kunci Unutuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	98
TABEL 2.4 Target Kinerja Dalam Perjajian Kinerja	100
TABEL 2.5 Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	102
TABEL 2.6 Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	105
TABEL 2.7 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2026	107
TABEL 2.8 Analis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Dbidangkan dengan Capaian Kinerja	108
TABEL 3.1 Laporan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru	116
TABEL 3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Barru	117
TABEL 4.1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota	121
TABEL 4.2 Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ...	122
TABEL 4.3 Anggaran Tahun 2024	124
TABEL 4.4 Rincian Anggaran SPM Urusan Pendidikan 2024	124
TABEL 4.5 Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru Berdasarkan Golongan	125



TABEL 4.6 Capaian Target dan Pembiayaan Standar

Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten

Barru Tahun 2024 138

TABEL 4.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Kabupaten Barru Tahun 2024 143

TABEL 4.8 Ketersediaan Tenaga Ahli Kesehatan 144

TABEL 4.9 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Urusan

Pekerjaan Umum 146

TABEL 4.10 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum 146

TABEL 4.11 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Urusan

Perumahan Rakyat dan Permukiman 151

TABEL 4.12 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

dan Permukiman 152

TABEL 4.13 Target Pencapaian SPM SATPOL PP dan

Penyelamatan 155

TABEL 4.14 Realisasi Sub Kegiatan SATPOL PP DAMKAR 156

TABEL 4.15 Target Pencapaian SPM Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 159

TABEL 4.16 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 160

TABEL 4.17 Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Barru

Tahun 2024162

TABEL 4.18 Target SPM Urusan Sosial 165

TABEL 4.19 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial 166

Table 4.20 SPM Urusan Kesehatan 172



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TABEL 4.21 Urusan Pekerjaan Umum SPM	174
TABEL 4.22 SPM Pekerjaan Umum	175
TABEL 4.23 Anggaran SPM Urusan Sosial	182



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Peta Administratif Kabupaten Barru	6
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

a. **Dasar Hukum**

Dasar untuk memberikan dasar pijakan yang jelas, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 ini berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang (UU) Kabupaten Barru adalah UU Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan. Undang-undang ini ditetapkan pada 28 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut. UU ini menggantikan ketentuan mengenai Kabupaten Barru dalam UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- b. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Barru terdiri dari 4 (empat) Kerajaan yang dikepalai masing-masing oleh seorang Raja selaku Kepala Pemerintahan, yaitu: 1) Kerajaan Barru, 2) Kerajaan Tanete, 3) Kerajaan Soppeng Riaja dan 4) Kerajaan Mallusetasi.
- c. Pada era Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1907, Kerajaan Tanete dan Kerajaan Soppeng Riaja menjadi Afdeling Barru dan pada Tahun 1908 menjadi Onder Afdeling Barru yang dipimpin seorang Kontroler bernama GOCHART yang berkedudukan di Sumpang BinangaE sedangkan Kerajaan Mallusetasi masuk dalam wilayah Onder Afdeling Pare-Pare. Keempat Kerajaan tersebut kemudian berubah menjadi Daerah



Swapraja yaitu, Swapraja Barru, Soppeng Riaja, Tanete dan Mallusetasi.

- d. Sebagai tindak lanjut lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Barru termasuk salah satu Kawedanan yang berubah status menjadi Kabupaten Daerah Otonom Tingkat II dengan ibukota Kabupaten berkedudukan di Sumpang BinangaE dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 18 orang.
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1960 Nomor U.P.7/2/39-376 Letnan Satu TNI LANAKKA dilantik pada tanggal 28 Pebruari 1960 di Balai Pemerintahan Swapraja Barru sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru yang Pertama. Tanggal 20 Pebruari 1960 yang merupakan pelantikan Bupati Kepala Daerah Pertama, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Barru. Hal ini dilakukan setelah melalui seminar sehari yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 1993. Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Barru No. 2 Tahun 1994 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru. Pada tanggal 20 Pebruari 2020, Kabupaten Barru telah berusia 60 Tahun dan telah 9 (sembilan) kali mengalami pergantian Bupati. Dengan usia 60 tahun hingga tahun 2020, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016- 2021 dengan berbagai tahapannya akan diupayakan sesuai target-target yang telah ditetapkan.

b. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara koordinat $4^{\circ}0.5'35''$ - $4^{\circ}47'35''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}35'00''$ - $119^{\circ}49'16''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $1.174,72 \text{ km}^2$ (117.472 Ha) dan berada $\pm 102 \text{ km}$ di sebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat $\pm 2,5 \text{ jam}$. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi.

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km . Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare. Berdasarkan kondisi geografis jika dikaitkan dengan pengembangan wilayah, maka Kabupaten Barru memiliki potensi geografis yang strategis yaitu (1) berada pada daerah lintasan perekonomian Utara-Selatan Sulawesi Selatan (2) merupakan wilayah trans Sulawesi (3) pintu perekonomian yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur dan daerah lainnya. Dengan kondisi geografis tersebut, maka Kabupaten Barru dapat menjadi "hub" atau sebagai pintu bagi Sulawesi Selatan untuk pengembangan berbagai potensi yang dimiliki baik sosial budaya maupun ekonomi ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini telah termuat dalam Master Plan



Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana Kabupaten Barru termasuk sebagai salah satu daerah dalam Koridor Ekonomi IV Pembangunan Pulau Sulawesi. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.1
LUAS DAERAH DAN PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
KABUPATEN BARRU

Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (km2)	%
731101	Tanete Riaja	6	1	174.29	14.84
731102	Tanete Rilau	8	2	79.17	6.74
731103	B a r r u	5	5	199.32	16.97
731104	Soppeng Riaja	5	2	78.9	6.72
731105	Mallusetasi	5	3	216.58	18.44
731106	Pujananting	6	1	314.26	26.75
731107	Balusu	5	1	112.2	9.55
TOTAL		40	15	1174.72	100

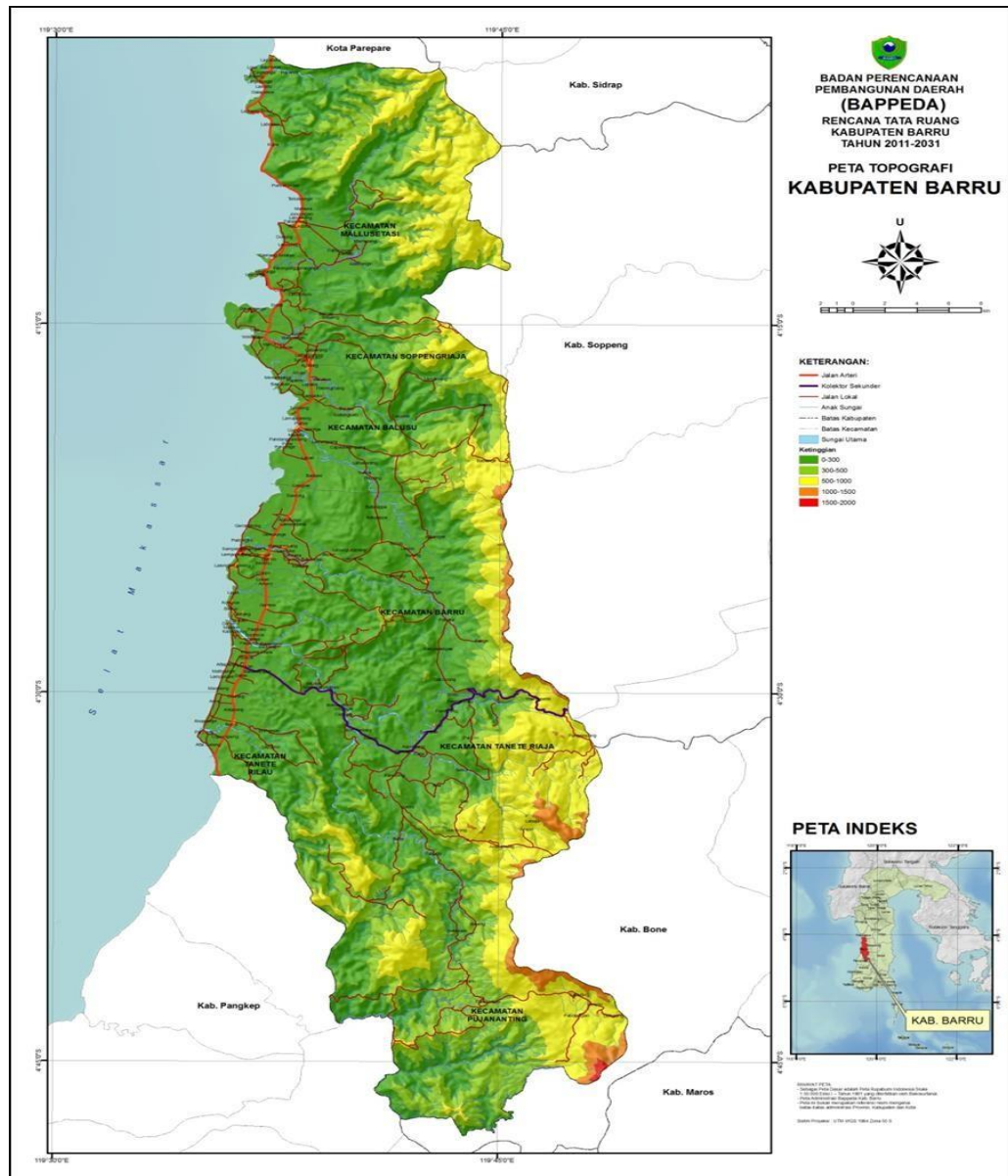
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2024



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

GAMBAR 1.1

PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN BARRU



Sumber: Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2024

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebesar 195,385 jiwa, meningkat sebesar 842 jiwa dibanding tahun 2023 sebesar 194.543



jiwa dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.2

JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	L	P	TOTAL	%	LUAS (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANETE RIAJA	13,226	13,643	26,869	13.75	174.29	154.16
2	TANETE RILAU	19,588	20,148	39,736	20.34	79.17	501.91
3	BARRU	23,076	23,751	46,827	23.97	199.32	234.93
4	MALLUSETASI	9,152	9,825	18,977	9.71	78.9	240.52
5	SOPPENG RIAJA	14,153	14,385	28,538	14.61	216.58	131.77
6	PUJANANTING	6,894	7,105	13,999	7.16	314.26	44.55
7	BALUSU	9,917	10,522	20,439	10.46	112.2	182.17
TOTAL		96,006	99,379	195,385	100	1,174.72	166.32

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab.Barru Tahun 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 kelurahan dan 40 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone



- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

TABEL 1.3
JUMLAH KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LUAS (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
1	2	3	4
1	TANETE RIAJA	174.29	154.16
2	TANETE RILAU	79.17	501.91
3	BARRU	199.32	234.93
4	MALLUSETASI	78.9	240.52
5	SOPPENG RIAJA	216.58	131.77
6	PUJANANTING	314.26	44.55
7	BALUSU	112.2	182.17
TOTAL		1,174.72	165.61

Sumber : Bagian Pemerintahan Kab.Barru Tahun 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan 9 Unit Kerja yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum, TataRuang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.



5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Badan Pendapatan Daerah
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
21. Dinas Pertanian
22. Sekretariat Dewan
23. Kecamatan Barru
24. Kecamatan Tanete Rilau
25. Kecamatan Tanete Riaja
26. Kecamatan Pujananting
27. Kecamatan Balusu
28. Kecamatan Soppeng Riaja
29. Kecamatan Mallusetasi



30. Inspektorat
31. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
32. Badan Keuangan dan Aset Daerah
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Sekretariat Daerah
35. Bagian Umum
36. Bagian Pemerintahan dan Otda
37. Bagian Hukum
38. Bagian Organisasi
39. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40. Bagian Administrasi Pembangunan
41. Bagian Perekonomian
42. Bagian Kesejahteraan Rakyat
43. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barru pada tahun 2024 adalah sebanyak 3,331 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) dan jumlah PPPK sebanyak 616 (enam ratus enam belas).

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

TABEL 1.4

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
4	PENDAPATAN DAERAH	940.283.691.695,24	914.279.038.808,80	97,23



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.442.711.328,00	111.782.307.168,50	98,54
4.1.01	Pajak Daerah	27.044.657.227,00	26.846.223.788,00	99,27
4.1.02	Retribusi Daerah	71.335.213.311,00	67.901.095.031,00	95,19
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.008.783.290,00	10.008.783.290,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.054.057.500,00	7.026.205.059,50	139,02
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.442.711.328,00	111.782.307.168,50	98,54
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	826.840.980.367,24	802.496.731.640,30	97,06
4.2.01.01	Dana Perimbangan	688.531.580.212,00	697.461.885.108,00	101,30
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.229.938.000,00	13.515.033.000,00	120,35
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	520.746.604.000,00	532.173.944.769,00	102,19
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.962.264.000,00	36.828.889.417,00	97,01
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	118.592.774.212,00	114.944.017.922,00	96,92
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	688.531.580.212,00	697.461.885.108,00	101,30
4.2.01.05	Dana Desa	39.357.327.000,00	39.357.327.000,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	19.602.465.000,00	19.602.465.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	58.959.792.000,00	58.959.792.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.349.608.155,24	46.075.054.532,30	58,07
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	69.562.887.195,24	41.302.648.532,30	59,37
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.786.720.960,00	4.772.406.000,00	48,76



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	79.349.608.155,24	46.075.054.532,30	58,07
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	826.840.980.367,24	802.496.731.640,30	97,06
	JUMLAH PENDAPATAN	940.283.691.695,24	914.279.038.808,80	97,23
5	BELANJA DAERAH	1.029.655.210.843,24	967.676.519.328,90	93,98
5.1	BELANJA OPERASI	761.309.745.889,92	728.023.752.616,75	95,63
5.1.01	Belanja Pegawai	411.365.562.633,54	402.283.316.011,00	97,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.158.685.190,00	286.572.762.416,57	92,69
5.1.03	Belanja Bunga	2.168.459.796,00	1.720.723.191,18	79,35
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.777.038.270,38	36.631.550.998,00	96,97
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	840.000.000,00	815.400.000,00	97,07
	JUMLAH BELANJA OPERASI	761.309.745.889,92	728.023.752.616,75	95,63
5.2	BELANJA MODAL	168.526.608.078,32	141.186.777.959,15	83,78
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.897.517.844,00	19.869.786.593,00	90,74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.934.206.448,32	64.680.027.133,15	80,92
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.918.395.986,00	56.230.308.533,00	85,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	776.487.800,00	406.655.700,00	52,37



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
	JUMLAH BELANJA MODAL	168.526.608.078,32	141.186.777.959,15	83,78
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.774.658.215,00	2.521.555.792,00	66,80
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.774.658.215,00	2.521.555.792,00	66,80
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.774.658.215,00	2.521.555.792,00	66,80
5.4	BELANJA TRANSFER	96.044.198.660,00	95.944.432.961,00	99,90
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.944.198.660,00	95.929.213.022,00	99,98
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	96.044.198.660,00	95.944.432.961,00	99,90
	JUMLAH BELANJA	1.029.655.210.843,24	967.676.519.328,90	93,98
	SURPLUS/DEFISIT	(89.371.519.148,00)	(53.397.480.520,10)	59,75
6	PEMBIAYAAN DAERAH	89.371.519.148,00	89.372.967.884,38	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.424.550.413,00	92.425.999.148,64	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.424.550.413,00	92.425.999.148,64	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.424.550.413,00	92.425.999.148,64	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	100,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.053.031.265,00		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
			3.053.031.264,26	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	89.371.519.148,00	89.372.967.884,38	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	35.975.487.364,28	0,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Permasalahan strategis pemerintah daerah merupakan kondisi riil yang terkait dengan adanya ketimpangan antara pencapaian pembangunan daerah dengan target yang diperoleh. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di day a gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi dan permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk mewujudkan SDM berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter;



2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan;
3. Peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat;
4. Perwujudan Keamanan dan Ketertiban;
5. Akselerasi tata kelola dan reformasi Birokrasi.

Berdasarkan prioritas tersebut, dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Barru secara makro sebagai berikut.

1. Belum optimalnya kualitas manusia Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan terutama pada aspek pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Barru dibuktikan dari capaian IPM Kabupaten Barru pada tahun 2018 yang masih berada pada peringkat ke-8 Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara capaian komponen IPM yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) sebesar 68,60 tahun, dimensi pendidikan yang diwakili oleh harapan



lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sebesar 13,56 dan 7,86 tahun, serta dimensi pendapatan (standar hidup layak) yang diwakili oleh paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) sebesar Rp. 10.622.000. Hal ini berhubungan dengan permasalahan pokok pada dimensi kesehatan antara lain angka kematian bayi (AKB) dan angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pelayanan dasar kesehatan, sementara permasalahan pokok pada dimensi pendidikan adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan berdampak pada belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu menyebabkan akses dan mutu pendidikan juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan permasalahan pokok pada dimensi pendapatan dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja dan masih tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan belum optimalnya pendapatan perkapita masyarakat.

2. Masih tingginya ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi disebabkan karena adanya ketidakstabilan capaian indikator perekonomian yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, dan pendapatan perkapita serta nilai investasi. Meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum menjamin adanya distribusi pendapatan yang proporsional terlihat dari indeks Gini pada tahun 2018 masih berada pada kisaran angka 0,38. Sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok berpendapatan rendah dan menengah, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi masih dinikmati sebagian kecil penduduk. Oleh karena itu,



pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan bergeraknya sektor riil terutama sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti di sektor pertanian dan UMKM.

3. Masih rendahnya daya saing daerah

Komponen daya saing daerah meliputi ketersediaan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan pengembangan inovasi daerah. Permasalahan pokok pada peningkatan daya saing yaitu ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai yang terwakili oleh proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,608 pada tahun 2018, hal ini berarti masih ada sekitar 0,392 dalam kondisi rusak. Sementara permasalahan pokok kualitas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kegiatan usaha manusia dan dampak pemanasan global dan pada tahun 2018 indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru masih sebesar 69,17. Sedangkan permasalahan pokok pada pengembangan inovasi daerah dalam berbagai sector terutama pada sektor pengembangan industri menjadi salah satu permasalahan dalam peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, adil, proporsional, dan berkualitas tetap harus dimaksimalkan agar ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Barru bergerak sehingga investasi dan daya saing pun kian meningkat.

4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem keamanan dan ketertiban.

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu variabel dalam mewujudkan kondusifitas suatu wilayah. Permasalahan pokok pada aspek ini adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah



dalam penerapan sistem keamanan dan ketertiban yang ditunjukkan oleh angka kriminalitas Kabupaten Barru masih pada kisaran 7,7, angka ini lebih rendah dari pada angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 16,6 dan Nasional sebesar 14. Situasi tersebut perlu didukung dengan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Disamping itu pembangunan wilayah merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah sekaligus tangguh terhadap potensi bencana yang ada.

5. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan

Kapasitas kelembagaan pemerintahan Kabupaten Barru perlu dimaksimalkan. Kinerja Perangkat Daerah belum optimal karena masih terkendala pada penataan ketatalaksanaan, penggunaan teknologi informasi, penerapan sistem informasi dan manajemen serta e-government. Selain itu, upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik masih perlu menjadi perhatian. Perangkat daerah dalam melayani masyarakat seharusnya menerapkan pemerintahan yang efisien inovatif dan menjaga integritas diri selaku aparat sipil negara. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggung jawaban).

Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus dengan



kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Visi pembangunan Kabupaten Barru 2021-2026 mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati yaitu;

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2021-2026 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

Sejahtera, Kondisi dimana masyarakat Barru hidup Makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial;

Mandiri, kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru;

Berkeadilan, kondisi ideal dimana dampak pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal dibelakang;



Bernafaskan Keagamaan, kondisi ideal dimana seluruh aktifitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Misi Pembangunan Jangka Menengah

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah--langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya; Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal;
- b. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal;
- c. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (***good and clean governance***) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi;



- f. Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

TABEL 1.5
PENJELASAN VISI MISI

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri dari pelayanan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang difokuskan pada pengendalian harga dan ketersediaan pangan	Sejahtera
2	Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kondisi tentram, tertib dan aman melalui pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	Sejahtera
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal	Mencakup upaya umum dalam membangun dan memelihara, mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah hingga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dalam menunjang perekonomian daerah	Mandiri
4	Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategis perekonomian daerah dengan memastikan peningkatan	Mandiri



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
		pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu	
5	Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Berkeadilan
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) serta yang akuntabel berbasis teknologi informasi.	Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan pelayanan publik yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi	Berkeadilan
7	Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama yang terdiri dari peningkatan kualitas pelayanan	Bernafaskan keagamaan

Sumber: RPJMD Kab. Barru 2021-2026



c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Perumusan Program Pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan dalam penyusunan program Pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program Pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas terhadap sasaran Pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Prioritas Pembangunan daerah merupakan Upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun program prioritas yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas sebagai berikut :

1. Penuntasan Reformasi Birokrasi/ Pemerintahan Melayani;
2. Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas;
3. Modernisasi pertanian;
4. Infrastruktur fisik dan ekonomi berbasis wilayah;
5. Pembangunan Kawasan industri halal serta BLK;
6. Bantuan kerja UMKM;



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

7. Pembangunan sektor pariwisata berbasis Masyarakat;
8. Optimaslisasi peran pemuda dan olahraga;
9. Aktualisasi nilai seni dan budaya;
10. Pembangunan dan optimalisasi rumah tahfidz di setiap kecamatan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TABEL 1.6
RPJMD 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Fungsi/Outcome Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEBANGWA PETAJARAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	3		5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Daya Baki Masyarakat	Peritas Daya Baki	10,91	11,12		11,35		11,60		11,86		12,02		12,02		
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Perencanaan dan pemantauan keamanan pangan	42,3	65	35.000.000	68	140.000.000	72	140.000.000	74	140.000.000	78	140.000.000	78	595.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KEBUDUKUM- SANTHAN
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kondisi nilai barang antar waktu	13	10	51.287.860	10	54.353.617	10	55.440.690	10	56.549.503	10	57.680.493	10	277.312.163	DINAS KOP UM & DAG
2	Misi 3 : Meningkatkan lingkungan yang kondusif serta pembangunan dan penguatan nilai budaya lokal															
	Tujuan 2 : Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	-	0,09		0,72		0,73		0,76		0,8		0,8		
	Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Perencanaan Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	0,004	0,011		0,009		0,006		0,004		0,001		0,001		
		Perencanaan Warga Negara yang mempersedek layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	100	150.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	330.000.000	BPBD
		Perencanaan Warga Negara yang mempersedek layanan Peneguhan dan keselamatan terhadap bencana (SPM)	100	100	377.005.315	100	424.145.421	100	436.528.330	100	449.138.696	100	462.042.074	100	2.148.880.037	
		Perencanaan Warga Negara yang mempersedek layanan penyuluhan dan evaluasi korban bencana (SPM)	100	100	80.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	680.000.000	
9	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan KEMERAKSIAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	100	1.639.526.937	100	1.672.317.476	100	1.705.763.825	100	1.739.879.102	100	1.774.676.664	100	8.532.164.024	SATPOL PP DAN DAMKAR	
		Waktu tanggap (response time)	15	15	54.589.839	15	55.681.636	15	56.795.268	15	57.931.174	15	59.089.797	15	284.087.714		
11	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100	100	327.746.750	100	335.634.088	100	343.915.792	100	352.611.581	100	361.742.161	100	1.721.650.371	DINAS SOSIAL	
	Tujuan 3 : Meningkatkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 13,73%	0	5,45		7,35		9,09		10,91		12,73		12,73			
	Sasaran 3 : Terwujudnya Penguatan Seni, Pengayaan Seni Budaya dan kreatifitas lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara lokal	0,35	9,92		11,11		12,7		14,29		15,87		15,87			
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBIB	0	0,11	657.000.000	0,22	657.000.000	0,44	657.000.000	0,55	657.000.000	0,66	657.000.000	0,66	3.285.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
13	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase budaya lokal dan sikon bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBIB	0	0,25	160.036.000	0,75	181.450.000	1	24.500.000	1,5	253.550.000	1,5	323.650.000	1,5	943.186.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Misi 3 : Meningkatkan Pemangkuas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal																	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDAMIAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Pembangunan antar wilayah.	Indeks Williamson	0,29	0,29		0,28		0,27		0,26		0,25		0,25		
	Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.	Indeks daya saling daerah Pilar infrastruktur	3,583	3,83		3,874		3,881		3,884		3,901		3,901		
		persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh sistem irigasi	50	52,66	7.500.000.000	54,49	8.000.000.000	55,32	9.000.000.000	57,15	10.000.000.000	60	10.000.000.000	60	44.500.000.000	
14	PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	4,05	5,71	13.481.281.831	6,54	13.425.590.971	7,37	13.369.558.644	8,2	13.135.966.396	9,03	14.086.550.896	9,03	67.498.948.728	DINAS PUPA, PPA & PERTANAHAN
	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	96,63 Layak dan 62,30 aman	97,75 Layak dan 64,20 aman	1.422.593.490	98,31 Layak dan 66,31 aman	1.651.045.360	98,57 Layak dan 68,21 aman	1.880.066.267	99,43 Layak dan 70,32 aman	2.309.667.592	100 Layak dan 72,22 aman	2.539.860.944	100 dan 72,22 aman	9.803.333.653	DINAS PUPA, PPA & PERTANAHAN
16	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	88,74	100	4.100.000.000	100	3.764.022.649	100	3.799.303.102	100	3.835.389.164	100	4.071.994.948	100	19.570.609.864	DINAS PUPA, PPA & PERTANAHAN
17	PROGRAM PENYULUHAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,12	70,98	23.476.943.746	74,64	38.863.998.923	78,80	39.835.208.717	81,96	50.584.478.707	85	47.381.676.719	85	200.142.306.612	DINAS PUPA, PPA & PERTANAHAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program/ Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
1	2	3	5															
18	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang mendapatkan rumah layak huni (SPM)	100	717.875.000	100	1.607.775.000	100	1.507.775.000	100	1.507.775.000	100	1.507.775.000	100	1.507.775.000	100	6.848.975.000	DINAS PUPR, PUP & PERTANAHAN	
			100	100.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.800.000.000		
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelembagaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	45,00	52,00	590.515.400	55,00	348.025.450	57,00	348.025.450	61,00	348.025.450	65,00	348.025.450	65,00	1.982.617.200	DINAS PUPR, PUP & PERTANAHAN		
20	PROGRAM PENGGELOJAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Jumlah orang/borang yang teranghuti melalui dermaga/ kapal Laut	2%	2%	2.063.883.300	2%	2.105.160.966	2%	2.147.264.185	2%	2.190.209.469	2%	2.234.013.658	2%	10.740.531.579	DINAS PERHUBUNGAN		
4	Misi 4 : Meningkatkan daya saing melalui kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berbasiskan lingkungan																	
Tujuan 5 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan			7,41	4,47		5,91		6,04		7,23		7,31		7,31				
Sasaran 7 : Meningkatnya sektor- sektor strategis Perekonomian daerah			30,27	31,94		32,32		32,97		33,29		33,86		33,86				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022			2023			2024			2025			2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target		Rp.
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	5																		
21	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	942 M	235 M	339.024.460	350 M	335.604.949	465 M	342.317.045	580 M	349.163.389	695 M	356.146.657	695 M	1.712.256.503	DINAS PMPTSP					
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produk Perikanan Budidaya	6200,9 Ton	6359 Ton	1.320.000.000	6491 Ton	1.550.400.000	6625 Ton	1.580.802.000	6798 Ton	1.612.418.040	6986,59 Ton	1.644.666.401	6986,59 Ton	7.908.286.441	DINAS PERIKANAN					
23	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Total Produk Perikanan Olahan perikanan	1325,85 Ton	1378 Ton	246.000.000	1393 Ton	250.320.000	1407 Ton	255.938.400	1442 Ton	261.057.168	1471 Ton	266.278.311	1494 Ton	1.280.193.879	DINAS PERIKANAN					
24	PROGRAM PENGUKUTAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2%	2%	3.844.896.700	2%	5.478.986.370	2%	5.602.835.007	2%	6.090.518.508	2%	6.699.570.358		27.716.806.943	DINAS PARIWISATA, KEPERINDAAN, N. DAN OR					
25	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	-	6,05	415.804.479	7,45	417.883.501	6,94	419.972.919	6,49	422.072.783	6,09	424.183.147	6,09	2.099.916.630	DINAS PARIWISATA, KEPERINDAAN, N. DAN OR					
26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,48%	6,98%	2.570.800.000	7,48%	2.047.450.000	7,98%	2.172.899.500	8,48%	2.236.112.485	8,98%	2.306.021.860	8,98%	11.333.263.845	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
		Tingkat Produktivitas Sektor Pertanian Per Tahun	1,45%	2,45%	350.000.000	2,95%	350.000.000	3,45%	350.000.000	3,95%	350.000.000	4,45%	350.000.000	4,45%	1.750.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,43%	1,45%	9.087.000.000	1,47%	9.507.500.000	1,50%	9.420.000.000	1,52%	10.090.000.000	1,55%	10.169.350.000	1,55%	48.273.850.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	5														20
21	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	942 M	235 M	329.024.460	350 M	335.604.949	465 M	342.317.048	580 M	349.163.389	695 M	356.146.657	695 M	1.712.256.303		DINAS PMPPTSP
22	PROGRAM PENGKUALIFIKAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produk Perikanan Budidaya	6203,9 Ton	6359 Ton	1.320.000.000	6491 Ton	1.550.400.000	6625 Ton	1.580.802.000	6798 Ton	1.612.418.040	6986,59 Ton	1.644.666.401	6986,59 Ton	7.908.286.441		DINAS PERIKANAN
23	PROGRAM PENGKUALIFIKAN DAN PEMANHASAN HASIL PERIKANAN	Total Produksi Produk Olahan perikanan	1325,85 Ton	1378 Ton	246.000.000	1393 Ton	250.930.000	1407 Ton	255.938.400	1442 Ton	261.057.168	1471 Ton	266.278.311	1494 Ton	1.280.193.879		DINAS PERIKANAN
24	PROGRAM PENGKUALIFIKAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2%	2%	3.844.896.700	2%	5.478.986.370	2%	5.602.835.007	2%	6.090.518.508	2%	6.699.370.358		27.716.806.943		DINAS PARIWISATA, KEPERINDAAN N. DAN OR
25	PROGRAM PEMANHASAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	-	8,05	415.804.479	7,45	417.883.501	8,94	419.972.919	6,49	422.072.783	6,09	424.183.147	6,09	2.099.916.830		DINAS PARIWISATA, KEPERINDAAN N. DAN OR
26	PROGRAM PENGKUALIFIKAN DAN PEVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,48%	6,98%	2.570.800.000	7,48%	2.047.450.000	7,98%	2.172.899.500	8,48%	2.236.112.485	8,98%	2.306.021.860	8,98%	11.333.283.845		DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PANGAN
27	PROGRAM PEVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	1,43%	2,45%	350.000.000	2,95%	350.000.000	3,45%	350.000.000	3,85%	350.000.000	4,45%	350.000.000	4,45%	1.750.000.000		DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN PANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Sasaran 8 : Meningkatnya pengelolaan sumber- daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,19	73,73		74,00		74,20		74,60		75		75,00			
28	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	35	31	28	260.438.733	26	289.882.582	23	314.558.664	21	334.839.919	21	1.358.766.566		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertampung	80,52	81,26		1.544.590.000	81,63	1.638.845.000	82	1.724.729.500	82,74	1.797.202.450	82,74	8.324.226.950		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
5	Misi 5 : Meningkatkan Perekonomian, pembangunan serta wilayah dan penanggulangan kemiskinan																
	Tujuan 6 : Memajukan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Indeks Gini	0,30	0,32	0,34		0,33			0,32		0,31		0,31			
	Sasaran 9 : Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,79	5,88	5,31		5,14			4,98		4,45		4,45			
		Angka Kemiskinan	8,20	7,45	6,07		6,41			6,38		6,05		6,05			
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	25	57,03	60	547.567.202	63,08	558.518.546	65	569.688.917	70	581.082.695	70	2.793.687.949		DINAS TENAGA KERJA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEKAWAHLA PENDAHLAN																			
No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	2022			2023			2024			2025			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	3	3	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
33	PROGRAM PERLUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PKKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	100	314.222.845	100	578.683.987	100	564.368.187	100	591.336.596	100	619.633.426	100	2.828.265.041	DINAS SOSIAL			
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase pertumbuhan usaha baru yang berhasil mikro	10,00%	10,10%	2.806.600.000	10,05%	2.806.600.000	10,07%	2.806.600.000	11,13%	70.000.000	11,14%	70.000.000	11,14%	8.539.800.000	DINAS KOP-UMK & DAG			
35	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0,46%	0,68%	315.528.330	0,90%	321.838.897	1,12%	328.275.875	1,34%	334.641.188	1,56%	341.538.012	1,56%	1.642.022.101	DINAS KOP-UMK & DAG			
6	Misi 6 : Mewujudkan era tida pemerintahan yang baik dan bersih good and clean governance / serta layanan public yang akurat dan berbasis teknologi informasi																		
Tujuan 7 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang berintegritas, baik dan bersih				46,34		70		73		75		80		80					
Sasaran 8 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan publik yang baik				55,82		65		70		75		80		80					
36	PROGRAM PENUNANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Tingkat Kematangan Organisasi	1	Level 1	419.829.000	Level 1	461.811.900	Level 2	507.993.990	Level 2	558.792.799	Level 2	614.671.639	Level 2	2.548.098.028	SEKRETARIA T DAERAH			
37	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematangan URUSU	Level 1	Level 1	350.000.000	level 2	350.000.000	level 3	350.000.000	level 3	375.000.000	level 3	400.000.000	level 3	1.825.000.000	SEKRETARIA T DAERAH			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Penguatan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEBANGKAWA PONDOKAN												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Pejabat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
31	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KESIA	Persentase Tenaga kerja yang terampil dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan luar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	0	9,8	191.870.854	12,1	198.708.271	14,4	199.622.437	16,7	203.614.885	19,00	207.687.183	19,00	998.503.630		DINAS TENAGA KESIA	
32	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar negeri (SPN)	100	100	74.121.000	100	75.931.630	100	78.046.579	100	79.371.976	100	79.614.136	100	387.085.321			
		Persentase anak terlatih yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar negeri (SPN)	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	217.000.000			
		Persentase warga negara bugar yang terlatih yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar negeri (SPN)	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	217.000.000			
		Persentase Warga Negara/gelandongan dan prajurit yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar negeri (SPN)	100	100	77.100.000	100	78.100.000	100	81.000.000	100	82.900.000	100	86.100.000	100	405.300.000			
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	394.500.000	



d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu “Pemerataan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Dengan Pemanfaatan Sektor-Sektor Strategis Daerah” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia;

1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya;
2. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas;
3. Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan;
4. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2024 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TABEL 1.7
PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BARRU TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
Peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Peningkatan budaya literasi masyarakat	Program pengelolaan pendidikan	Persentase warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud (SPM)	100	75.258.706.938	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (sd/mi, smp/mts) (SPM)	100		
				Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100		
	Meningkatnya usia harapan	Peningkatan kualitas pelayanan kb dan	Program pemenuhan upaya kesehatan	Persentase ibu hamil yang mendapatkan	100	118.872.470.726	Dinas Kesehatan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
	hidup masyarakat	pendewasaan usia perkawinan pertama	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	layanan kesehatan (SPM)			
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100		
				Angka status gizi masyarakat	92,03%		
				Persentase imunisasi dasar lengkap	85%		
				Indeks keluarga sehat	0,06		
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan sdm kesehatan yang kompeten sesuai standar dan peraturan perundang-undangan	92%	58.678.400	Dinas Kesehatan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat	Peningkatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Persentase penduduk yang menerapkan PHBS	82%	186.928.000	Dinas Kesehatan
			Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,63%	70.874.500	Dinas PMDPPKBPPPA
			Program pemenuhan hak anak (PHA)	Nilai capaian evaluasi kabupaten layak anak	750	115.000.400	Dinas PMDPPKBPPPA
			Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	72%	102.192.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar waktu	≥10	55.000.000	Dinas Kop, UKM & Dag
Peningkatan dan pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	55,32	8.705.937.777	Dinas PUTR - PERKIM
		Meningkatkan kualitas konstruksi		Persentase luas kawasan permukiman rawan	7,37	10.472.847.218	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
		jaringan jalan dan jembatan		banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di ws kewenangan kab/kota			
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	98,87 layak dan 68,21 aman	3.254.400.000	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	1.993.238.000	Dinas PUTR - PERKIM
			Program penyelenggaraan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	78,80	113.957.075.906	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengembangan perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	1.750.275.000	Dinas PUTR - PERKIM
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	100		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)			
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan memiliki kelengkapan psu (prasarana, sarana dan utilitas umum)	57,00	3.648.319.640	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengelolaan pelayaran	Persentase peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga/kapal laut	2%	241.509.667	Dinas Perhubungan
Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai realisasi PMA dan PMDN	465 m	438.200.000	Dinas Pmptsp
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	6625 ton	1.365.500.000	Dinas Perikanan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)			
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan memiliki kelengkapan psu (prasarana, sarana dan utilitas umum)	57,00	3.648.319.640	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengelolaan pelayaran	Persentase peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga / kapal laut	2%	241.509.667	Dinas Perhubungan
Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai realisasi PMA dan PMDN	465 m	438.200.000	Dinas Pmptsp
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	6625 ton	1.365.500.000	Dinas Perikanan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)			
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan memiliki kelengkapan psu (prasarana, sarana dan utilitas umum)	57,00	3.648.319.640	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengelolaan pelayaran	Persentase peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui melalui dermaga/kapal laut	2%	241.509.667	Dinas Perhubungan
Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai realisasi PMA dan PMDN	465 m	438.200.000	Dinas Pmptsp
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	6625 ton	1.365.500.000	Dinas Perikanan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				Persentase warga negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
				Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100		
				Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100		
			Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	898.516.000	Dinas Sosial
			Program pemberdayaan usaha menengah,	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,97%	2.800.000.000	Dinas Kop, UKM & Dag



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				Persentase warga negara lanjut usia terlanjut yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
				Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100		
				Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100		
			Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	898.516.000	Dinas Sosial
			Program pemberdayaan usaha menengah,	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,97%	2.800.000.000	Dinas Kop, UKM & Dag



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penetapan perda apbd tepat waktu dan sesuai peraturan per undang-undangan	100%	102.801.831.487	BKAD
				Persentase realisasi pengeluaran kas daerah terhadap realisasi penerimaan kas daerah	100%		BKAD
				Persentase penyampaian laporan keuangan ke BPK RI tepat waktu	100%		BKAD
			Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase pemberdayaan aset tetap tanah dan bangunan	100%	779.187.550	BKAD
			Program kepegawaian daerah	Nilai indeks implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)	B (61-80)	1.921.928.050	BKPSDM
			Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pns yang mengikuti pengembangan	80%	976.854.500	BKPSDM



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				kompetensi 20 jp pertahun			
			Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	90	1.476.118.000	Inspektorat Daerah
			Program pendaftaran penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99%	230.663.500	Dinas Dukcapil
			Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran	99%	125.927.900	Dinas Dukcapil
			Program pelayanan penanaman modal	Persentase peningkatan ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	98,98	188.979.000	Dinas PMPTSP
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Peningkatan desa dan kelurahan tangguh bencana	Program penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	36.132.000	BPBD
				Persentase warga negara yang	100	869.876.330	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)			
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	132.000.000	
			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	2.037.700.000	Satpol PP Dan Damkar
				Waktu tanggap (<i>response time</i>)	15 menit	55.681.636	
			Program penanganan bencana	Presentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	522.010.000	Dinas Sosial



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
	Terwujudnya penguatan seni budaya dan kearifan lokal	Pelaksanaan pelestarian budaya lokal	Program pengembangan kebudayaan	daerah kab/kota (SPM) Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	0,44	1.018.143.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBTB	1	24.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100	859.670.000	Satpol PP Dan Damkar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Prosentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.	100	123.558.782	Badan Kesbangpol
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Presentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	38.602.817.853	Sekretariat Daerah
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	50%	342.156.063	Badan Kesbangpol

Sumber : Data oleh Rannalithanada Kabupaten Barru Tahun 2022



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka penerapan SPM di daerah Kabupaten Barru adalah sejumlah 6 (enam) bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum



dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan

daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah. Dari dua pertimbangan tersebut, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

1.1.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:



1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota;



Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis.

1.1.3.2. Kebijakan Umum

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program



penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Barru untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Barru menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

A. Bidang urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Anak Usia Dini



(PAUD)

- b. Jenis pelayanan minimal Urusan Pendidikan Dasar
 - c. Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Kesetaraan
2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru
- a. Rencana capaian standar pelayanan minimal urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL. 1.8

**TARGET PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2021**

No	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100	100	100

- b. Rencana capaian standar pelayanan minimal urusan Pendidikan Dasar tahun 2024 adalah sebagai berikut



TABEL 1.9

**TARGET PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2021**

No	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil	100	100	100	100	100
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) orang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan Tulis	100	100	100	100	100
3	Disetiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta Didik	-	-	-	-	-



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

4	Disetiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari guru	100	100	100	100	100
5	Disetiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan Pendidikan	100	100	100	100	100
6	Disetiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran , dan untuk daerah khusus tersedia satu guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	100	100	100	100
7	Disetiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100	100
8	Disetiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing 40% dan 20%	100	100	100	100	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

9	Disetiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	100	100	100	100	100
10	Disetiap Kab/Kota semua Kepala SD berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100	100
11	Disetiap Kab/Kota semua Kepala SMP berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100	100
12	Disetiap Kab/Kota pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100	100
13	Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	100	100	100	100
14	Kunjungan pengawas ke satuan Pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	100	100	100	100

Sedangkan target pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana di atur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 1.10

**TARGET PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2021**

No	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warga negara usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	100	100	100	100

c. Jenis Pelayanan minimal urusan pendidikan kesetaraan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.11

**TARGET PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2021**

NO	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	100	100



B. Bidang urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- d. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar

2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah



Pelayanan antenatal yang diberikan kepada ibu hamil dengan standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan yakni satu kali trimester pertama, dua kali trimester kedua dan tiga kali trimester ketiga dengan standar kualitas yang memenuhi kriteria 10T dan pelayanan ultrasonografi. Tahun tahun 2023 jumlah sasaran ibu hamil 3436 dengan capaian 3064 (89%), pada tahun 2024 jumlah sasaran ibu hamil 2370 dengan capaian 2292 (70%).

Indikator ini turun jika dibandingkan tahun 2023. Cakupan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan ibu hamil K6 (kunjungan 6 kali 1,2,3) sesuai standar belum mencapai target disebabkan karena data proyeksi terlalu tinggi, kesalahan pengelola dalam menentukan jumlah sasaran, ada ibu hamil yang merupakan pendatang, hamil diluar nikah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah:

- Orientasi dan Edukasi Petugas untuk Pelayanan Catin di Puskesmas
- Pertemuan Pengkajian Audit Maternal BOK Kabupaten
- Pengadaan Stiker P4K
- Pelaksanaan Kelas ibu hamil
- Workshop Penguatan Jejaring & Pendamping Ibu Hamil Resiko Tinggi bagi Kader
- Pemantauan Bumil Resti
- Pemantauan Ibu Hamil Trimester III



- Pemantauan Ibu Hamil Yang Tidak Rutin Periksa Kehamilan
- Pemberian Suplement Zink penderita diare bagi bumil
- Sweeping Ibu Hamil Baru & Bumil Resti
- Kunjungan Rumah Bumil K4
- Pelacakan Bumil K1
- Pelayanan ANC di Posyandu
- Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil diPosyandu
- Pendampingan calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K
- Skreening golongan darah, protein urine dan HB pada Ibu Hamil
- Sweeping Suntikan TT pada Ibu Hamil
- Pelacakan Pada Bumil Menjelang Persalinan
- Deteksi dini kehamilan pada pengantin baru
- screening Hepatitis pada Ibu Hamil
- Pemeriksaan HIV dan shypilis pada ibu hamil

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah pelayanan persalinan yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi dengan persalinan dilakukan difasilitas pelayanan



kesehatan dan ditolong oleh tim paling sedikit satu orang tenaga medis dan dua orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dengan mengacu pada acuan persalinan normal sesuai standar dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan untuk standar persalinan komplikasi. Tahun 2023 jumlah sasaran ibu bersalin 3245 dengan capaian 2772 (85%), tahun 2024 jumlah sasaran ibu bersalin 3251 dengan capaian 2379 (73%). Permasalahan dikarenakan ada ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh tenaga kesehatan dan diluar faskes, ada ibu yang bersalin ke daerah lain, kendala biaya dan sosial budaya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah:

- Peningkatan Kapasitas SDM Antenatal Care (ANC)
 - Penguatan Manajemen Aktif Kala III kaitannya dengan pendarahan dalam proses persalinan
 - Rumah tunggu kelahiran
 - Pemantauan Ibu Nifas
 - Sweeping ibu nifas dan neonatus
 - kegiatan Rujukan Persalinan
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan standar kuantitas kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal yakni kunjungan neonatal 1 (KN1), Kunjungan neonatal 2 (KN2), kunjungan neonatal



3 (KN3) dengan standar kualitas perawatan neonatal esensial saat lahir dan setelah lahir. Pada tahun 2023 jumlah sasaran bayi baru lahir 3096 dengan capaian 2705 (87%). Tahun 2024 jumlah sasaran Bayi Baru Lahir 3091 dengan capaian 2342 (76%) . Indikator ini menurun capaiannya dibanding tahun sebelumnya ini di sebabkan karena sebagian ibu yang datang melahirkan kemudian kembali ke daerah dimana suami bekerja, kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir, akses ke fasyankes sulit serta sosial budaya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah:

- Pemeriksaan neonatus atau pelayanan kesehatan bayibaru lahir/neonatal
- Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
- Orientasi Konselor ASI bagi Petugas Tkt. Kabupaten
- Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak Tkt.Kabupaten
- Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi
- Pemantauan bayi 9-15 bulan ibu reaktif hepatitis
- Pemantauan Neonatus & Neonatus Risti
- Pelacakan audit maternal/perinatal bayi/balita
- Pemantauan Bayi Resti



d. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit yang dimaksudkan untuk pemantauan tumbuh kembang anak balita. Tahun 2023 jumlah sasaran balita 13413 dengan capaian 10327 (77%), tahun 2024 jumlah sasaran balita 15177 dengan capaian 12506 (82%). Capaian Indikator meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan balita adalah:

- Pelaksanaan SDIDTK pada balita
- Pelaksanaan kelas ibu balita
- Penimbangan Rutin Bayi Balita di Posyandu
- Sweeping kegiatan SDIDTKA di Posyandu
- Pemeriksaan gigi dan Mulut di TK/PAUD
- Pelacakan Balita Yang tidak datang ke Posyandu dan yang tidak terdeteksi pertumbuhannya
- Pemberian PMT penyuluhan
- Sweping Vitamin A
- Pelaksanaan pelayanan Imunisasi dasar di posyandu

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai dengan standar meliputi skrining kesehatan, tindak lanjut hasil



skrining kesehatan dan pemberian imunisasi campak rubella, DT, td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara. Pada tahun 2023 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 7246 dengan capaian 6397 (88%), tahun 2024 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 26779 dengan capaian 26400 (99%). Indikator ini sudah meningkat dari tahun sebelumnya karena setiap anak pada usia pendidikan dasar sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah:

- Pelatihan dokter kecil
- Demonstrasi CTPS dan sikat gigi bersama di sekolah
- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah
- Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
- Penyuluhan Kespro Remaja
- Pertemuan Tekhnis Penjaringan Anak Sekolah
- Pembinaan UKS dan kader kesehatan anak sekolah
- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah
- Pemberian tablet Fe pada remaja putri
- Pemeriksaan berkala peserta didik
- Penyuluhan PHBS dan CTPS pada anak Sekolah Dasar
- Sweping pemberian tablet Fe pada remaja putri
- Pembinaan Kantin Sehat
- Pembinaan PKPR di sekolah



f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tahun 2023 jumlah sasaran 120204 dengan capaian 105912 (98%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 122436 dengan capaian 114365 (93%). Capaian Indikator mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum mencapai 100% dikarenakan kegiatan pelayanan skrining Kesehatan sebahagian tidak terlaksana akibat dari SDM yang multifungsi dalam hal ini bekerja rangkap serta adanya keterbatasan alat.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia produktif adalah:

- Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut
- Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun.
- Pengukuran tekanan darah
- Pemeriksaan gula darah
- Pengukuran LILA
- Pemeriksaan Hb
- Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
- Pemeriksaan SADANIS dan IVA
- Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa



- Status imunisasi TT bagi calon pengantin

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi Perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tahun 2023 jumlah sasaran 21069 dengan capaian 15574 (48%), tahun 2024 jumlah sasaran 22199 dengan capaian 15474 (70%). Capaian Indikator belum mencapai target disebabkan karena terbatasnya petugas dalam memberikan pelayanan dan belum optimalnya sosialisasi terkait pelayanan kesehatan lansia dan masih terbatasnya sarana pemeriksaan kesehatan lansia di semua sarana pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia adalah:

- Penguatan Pelayanan Posyandu Lansia
- Penguatan Petugas tentang Puskesmas Santun Lansia
- Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu
- Kunjungan pelayanan homecare lansia resti
- Screening IVA
- Penimbangan BB, Pengukuran TB dan Pemeriksaan TDPada Lansia
- Screaning Penyakit Akibat Gangguan Kognitif, Degeneratif dan Mental Emosional



- Kunjungan kader posyandu lansia
- pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- anamnesis perilaku berisiko

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 48784 dengan capaian 31174 (76%), tahun 2024 jumlah sasaran 49979 dengan capaian 44431 (89%). Indikator tidak mencapai target Hal ini dikarenakan kegiatan pelayanan skrining kesehatan sebahagian tidak terlaksana akibat dari SDM yang multifungsi dalam hal ini bekerja rangkap. Keterbatasan alat (tensimeter) karena rusak dan hilang serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri keFKTP secara berkala.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan hipertensi adalah:

- Pemantauan Kegiatan Pelayanan Hipertensi di Posbindu
- Pendampingan Penderita Hipertensi melalui kunjungan rumah
- Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi berbasis Web
- Workshop Program Informasi Posbindu PTM bagi petugas Puskesmas
- Pengukuran tekanan darah
- Pelayanan edukasi non farmakologi



- Pelayanan farmakologi
- Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar adalah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi, terapi farmakologi. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 3058 dengan capaian 3539 (116%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 3134 dengan capaian 3510 (112%). Indikator pelayanan kesehatan penderita diabetes militus telah melebihi target. Hal ini dikarenakan Sudah ada kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke FKTP secara berkala dan ketersediaan alat.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- Pelatihan Teknis Faktor resiko DM Secara Mandiri dan Berkelanjutan bagi petugas Puskesmas
- Pendampingan Penderita PTM (Diabetes Melitus) melalui kunjungan rumah
- Pemeriksaan klinis
- Pemeriksaan penunjang
- Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)
- Terapi farmakologi



j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar adalah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 437 dengan capaian 455 (104%), tahun 2024 jumlah sasaran 439 dengan capaian 446 (102%). Indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sudah melampaui target ini dikarenakan kegiatan pelacakan atau skrining kasus ODGJ berat sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- Pemeriksaan kesehatan jiwa
- Edukasi
- Tata laksana

k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar adalah pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 3076 dengan capaian 2996 (97%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 5103 dengan capaian 3669 (72%). Indikator pelayanan kesehatan orang terduga TBC mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena pasien dengan gejala batuk masih malu- malu berobat ke fasilitas kesehatan dan keterbatasan alat catridge TCM.



Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang terduga TBC adalah:

- Mapping Up dan Validasi Kasus TB
- Workshop Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)
- Ketuk Pintu TB Day
- Penjaringan Suspek TB
- Pelacakan Tb Kusta Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Gerakan Serentak Penemuan Kasus Atau Deteksi Dini Penderita TB/Suspek TB
- Pengambilan Specimen Pada Penderita Suspek TB
- Pemeriksaan Kontak Serumah Penderita TB
- pemantauan kepatuhan minum obat pasien TB Paru

I. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 3760 dengan capaian 3191 (85%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 3743 dengan capaian 2650 (71%). Capaian indikator turun dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan penanganan kelompok risiko tinggi (high risk group) tidak maksimal, selain itu keterbatasan tenaga puskesmas yang harus menjangkau semua orang yang berisiko HIV termasuk penjahajaseks, transgender dan pengguna napza suntik dan sering



terjadi roling petugas di Puskesmas.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah :

- Sosialisasi HIV Pada Populasi Kunci
- Pemantauan Triple Eliminasi HIV, Shipilis dan Hepatitis
- Pelacakan dan deteksi dini HIV/AIDS pada Ibu hamil di posyandu
- Screening HIV pada penderita TB
- Deteksi dini dan penemuan kasus HIV / AIDS
- Pemantauan dan tatalaksana kasus HIV

C. Bidang urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- a. Progam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota.

2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan



Umum pada kabupaten Barru sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses air minum layak pada tahun 2024 adalah 96,75%

- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses sanitasi layak pada tahun 2024 adalah 66,64%

D. Bidang urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat pada kabupaten Barru sebagai berikut:



- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2024 adalah 100 %.

- b. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi yang terkena relokasi program Pemerintah daerah 0 %.

E. Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Urusan Trantibum Damkar

- a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Pelayanan Penegakan Perda/Perkada.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

- b. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Penerapan Standar Pelayanan minimal di Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal tabel berikut:



TABEL 1.12
TARGET PENCAPAIAN SPM
SATPOL PP DAMKAR DAN PENYELAMATAN

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	target
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	100%
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %

2. Urusan Trantibum Bencana

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- Pelayanan informasi rawan bencana.
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.



b. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Penerapan Standar Pelayanan minimal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal table berikut:

TABEL 1.13
TARGET PENCAPAIAN SPM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	target
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh informasi rawan Bencana	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pe	persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

F. Bidang urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan



Kabupaten/Kota diukur dalam 5 (lima) indikator pelayanan dasar yang akan dicapai secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan Kabupaten Barru memiliki korelasi yang sangat jelas dengan 5 (lima) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap, yang meliputi:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

TABEL 1.14
TARGET PENCAPAIAN SPM

No.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai(%)		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Instansi Sosial



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Sosial	Instansi
3	Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Sosial	Instansi
4	Presentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Sosial	Instansi
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten /Kota	100	2024	Dinas/ Sosial	Instansi



BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan.

TABEL 2.1

CAPAIAN KINERJA MAKRO KABUPATEN BARRU TAHUN 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	2023	2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,80	74,51	0,96
2	Angka Kemiskinan (%)	8.46	8,31	1,77
3	Angka Pengangguran (%)	5.89	6,42	-8,99
4	Pertumbuhan ekonomi (%)	3.51	4,92	40,17
5	Pendapatan Per Kapita (Rp)	49,965,970	52,274,820	4,62
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.371	0,310	16,44

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran usia harapan hidup, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek



kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3) Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM yang tinggi biasanya berkorelasi dengan sistem kesehatan yang lebih baik, akses layanan kesehatan yang lebih baik, dan harapan hidup yang lebih lama. Peningkatan kesehatan berkontribusi pada produktivitas tenaga kerja yang lebih baik.

Pendidikan: Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada perekonomian. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih inovatif dan dapat beradaptasi dengan perubahan.

Perekonomian: IPM yang lebih tinggi sering kali mencerminkan pendapatan per kapita yang lebih baik, yang berarti masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, menginvestasikan dalam pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Masyarakat dengan IPM yang tinggi umumnya memiliki tingkat kesetaraan yang lebih baik, dengan kesempatan yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat. Ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan



pengurangan konflik.

Secara keseluruhan, IPM dapat dianggap sebagai indikator penting yang menggambarkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan IPM harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru pada tahun 2024 mencapai 74,51 nilai ini meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 73,80 atau mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen.

Secara keseluruhan, IPM dapat dianggap sebagai indikator penting yang menggambarkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan IPM harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Indeks Kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.

Sumber data utama dalam perhitungan UHH saat ini adalah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Usia harapan hidup adalah ukuran rata-rata yang menunjukkan berapa lama seseorang diperkirakan akan hidup, biasanya dihitung dari saat lahir. Usia harapan hidup suatu daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk Akses terhadap layanan kesehatan, vaksinasi, dan pengobatan penyakit menular atau kronis berpengaruh besar; Nutrisi yang baik membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup; Tingkat pendidikan dapat berhubungan dengan pengetahuan tentang kesehatan dan gaya hidup sehat; Kondisi ekonomi yang baik sering kali memungkinkan akses yang lebih baik.

UHH Barru pada tahun 2024 mencapai 72,75 tahun. Artinya, secara



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,75 tahun.

Sementara itu, Indeks Pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Barru tahun 2024 sebesar 8,80, artinya secara rata-rata penduduk Barru yang berusia 25 ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,80 tahun atau setara kelas 2 SMP. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh generasi di masa mendatang. HLS Barru pada tahun 2024 sebesar 13,62 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,62 tahun atau setara dengan Diploma II.

Dimensi yang ketiga adalah standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita (PPP) yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) menggambarkan rata-rata pengeluaran per individu dalam setahun yang dapat dibandingkan antar wilayah karena telah meminimalkan faktor harga dan ketimpangan daya beli antar wilayah. Pengeluaran disesuaikan PPP Kabupaten Barru tahun 2024 senilai sekitar 12,06 juta rupiah. Semakin tinggi nilai pengeluaran menandakan kekuatan ekonomi masyarakat semakin bagus.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Secara tren pada tahun 2024, IPM tumbuh sebesar 0,71 persen dibandingkan tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Barru sebesar 2,12 lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan IPM, maka akan semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan Kabupaten Barru untuk mencapai level pembangunan manusia



yang lebih tinggi.

Keberhasilan pencapaian tujuan meningkatnya Kualitas SDM yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu 73,80 poin dengan realisasi sebesar 74,51 poin atau tingkat capaian sebesar 0,96 persen. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh tingkat capaian pada Indeks Kesehatan sebesar 105,03 persen dan tingkat capaian pada pengeluaran per kapita sebesar 103,61 persen.

Keberhasilan pencapaian indeks pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Kesehatan didukung oleh peningkatan capaian umur harapan hidup pada usia hamil pada perkawinan pertama dan penolong kelahiran/tempat melahirkan serta kesadaran perempuan untuk memilih menggunakan fasilitas Kesehatan sebagai tempat melahirkan yang semakin tinggi. Ketiga hal tersebut akan berpengaruh cukup besar terhadap angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup dari 15 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 15 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Begitupun dukungan pengeluaran per kapita terhadap keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat melalui capaian indikator ini sebesar 103,61 persen. Faktor penentu keberhasilan dari capaian ini dapat dilihat melalui kemampuan konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh fenomena ekonomi sepanjang tahun 2024. Keynes (1936) dalam Analisis Isu Terkini (BPS, 2017) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi konsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi. Kondisi daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan tidak mampu, akan menurun apabila harga barang terus naik di pasaran. Oleh sebab itu, inflasi dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil gambaran indikator pengukuran daya beli



masyarakat (pengeluaran konsumsi rumah tangga) dan faktor yang diduga mempengaruhi daya beli masyarakat (laju inflasi) memberikan gambaran efek yang searah yang artinya bahwa pertumbuhan PKRT yang melambat selama tahun 2024 dan inflasi tahunan juga lebih rendah di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Keselajaran antara pertumbuhannya PKRT dengan inflasi yang meningkat menunjukkan masih adanya permintaan/konsumsi masyarakat di Kabupaten Barru pada periode tersebut yang mana harga-harga barang sedang tinggi.

Indeks Pendidikan di tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif namun capaiannya belum mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan indeks Pendidikan ini bergantung Pemerataan terhadap akses pendidikan di suatu wilayah dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Serta digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Di Kabupaten Barru, yang berpengaruh terhadap ketidakberhasilan pencapaian Indeks Pendidikan adalah APS usia 16-18 tahun. Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, kita juga dapat menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh Pemerintah Kabupaten Barru masih harus meningkatkan program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar hingga 12 tahun dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Indikator kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan



ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian angka kemiskinan yang berhasil diturunkan sebesar 0,15 persen dari 8,46 persen pada tahun 2023 meningkat menjadi 8,31 persen pada tahun 2024. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah orang miskin melalui penguatan UMKM, pemberian bantuan modal, bantuan beasiswa belum mampu menurunkan jumlah orang miskin. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Kebijakan Sosial dan Jaminan Sosial seperti Program bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPJS Kesehatan dan Program Bansos bagi yang terdata melalui Exclusion Error dari Dinas Sosial Kabupaten Barru cukup efektif untuk penanganan kemiskinan.
- b. Pembangunan Infrastruktur pertanian dan industri serta Jalan, listrik, air bersih, dan internet yang dapat meningkatkan akses terhadap pasar dan layanan publik.
- c. Pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

2.1.3 Angka Pengangguran

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan diukur melalui indikator tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran dalam



suatu negara atau wilayah. Pengangguran terbuka merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja mencakup individu yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi aktif dalam mencari pekerjaan.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Barru pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, pada tahun 2023 lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Barru.

Angka pengangguran bertambah dari 5,89 persen pada tahun 2023 menjadi 6,42 persen pada tahun 2024 atau secara persentase bertambah 0,53 persen. Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa capaian Angka Pengangguran yang diperoleh Kabupaten Barru berada pada peringkat ke-3 terbawah dari kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. Angka Pengangguran Kabupaten Barru yang masih tinggi dipengaruhi oleh sektor investasi yang tidak berkembang serta pencari kerja yang dalam memilih pekerjaan harus sesuai dengan basic keilmuannya.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2024 mengalami



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,79 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,52 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,92 persen, atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,51 persen. Peningkatan PE pada tahun 2024 dipengaruhi oleh 3 sektor Lapangan Usaha pada 17 sektor lapangan Usaha yang merupakan pembangun struktur PDRB dengan kontribusi terbesar. 3 sektor tersebut diantaranya: Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 31,46 persen, Sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 20,25 persen, dan Sektor Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 10,09 persen. Sementara untuk 3 sektor PDRB yang mengalami pertumbuhan terbesar pada PDRB 2024 adalah Sektor Jasa Lainnya bertumbuh sebesar 15,66 persen, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial bertumbuh sebesar 12,17 persen serta Sektor Jasa Perusahaan bertumbuh sebesar 7,27 persen.

2.1.5 Pendapatan per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku



(ADHB) sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita tercatat sebesar 50,16 juta rupiah kemudian tercatat meningkat pada tahun 2024 sebesar 52,28 juta rupiah. Faktor pendukung peningkatan PDRB Perkapita Kabupaten Barru diantaranya : Kebijakan fiskal (subsidi dan insentif pajak) dan regulasi yang mendukung dunia usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru serta Program pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal mendorong peningkatan PDRB Perkapita.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan/Indeks gini

Rasio Gini adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau area tertentu. Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata (setiap orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama) dan 1 mengindikasikan distribusi yang sangat tidak merata (satu orang memiliki semua pendapatan atau kekayaan). Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase penurunan ratio gini sebesar 16,44 persen yaitu dari 0,371 pada tahun 2023 menjadi 0,310 pada tahun 2024. Indikator sasaran yang mendukung pencapaian indeks gini tersebut dipengaruhi oleh capaian tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat kemiskinan.

Penurunan rasio Gini dari 0,371 pada tahun 2023 menjadi 0,310 pada tahun 2024 mengindikasikan adanya peningkatan pemerataan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Barru. Hal ini menunjukkan kebijakan yang ada telah mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Gini adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat atau negara.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa.

Membaiknya rasio Gini dari 0,371 pada tahun 2023 menjadi 0,310 pada tahun 2024 atau sebesar 16,44 persen mengindikasikan adanya perbaikan terhadap ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Barru. Indikator sasaran yang mendukung pencapaian indeks gini tersebut dipengaruhi oleh capaian tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat kemiskinan.

Hal ini menunjukkan kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan inklusif mulai on the track untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Capaian indikator sasaran yang berkaitan langsung dalam mendukung pencapaian rasio gini yaitu angka kemiskinan. Ini mengindikasikan adanya peningkatan capaian kinerja dalam penanggulangan kemiskinan, namun demikian masih diperlukan upaya yang lebih masif untuk menangani masalah di sektor ketenagakerjaan, di mana meskipun ada pertumbuhan ekonomi, masyarakat menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak.

Dengan adanya indeks gini, dapat membantu kebijakan ekonomi yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dan mengidentifikasi kelompok yang memerlukan bantuan.

Membaiknya indeks gini di Kabupaten Barru antara lain disebabkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatnya investasi, meningkatnya akses pendidikan sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengurangi ketidaksetaraan



pendapatan, meningkatnya akses kesehatan yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan serta kebijakan pemerintah yang pro-poor yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barru dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan, serta pencapaian sasaran pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Tahun 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS) dalam bentuk Nota Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nota kesepakatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024.

Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi dua menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan desa; (8) pengendalian penduduk dan keluarga



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

berencana; (9) perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12) penanaman modal; (13) kepemudaan dan olah raga; (14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) perpustakaan; dan (18) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) energi dan sumberdaya mineral; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana yang diuraikan di atas, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan. Fungsi pendukung urusan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut mencakup: (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) kepegawaian; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah (Inspektorat), Unsur Kewilayahan (Kecamatan); Unsur Pemerintahan Umum (kesatuan bangsa dan politik dalam negeri).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	78,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	53,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,88	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	70,09	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	73,18	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	75,77	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	82,40	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17,49	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68,61	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	69,70	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,90	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standar	71,90	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	70,80	Dinas Kesehatan	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	10,71	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WSKewenangan Kab/Kota	17,96	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	2,66	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	97,53	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00	Dinas PUTR dan Perkim	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00	Dinas PUTR dan Perkim	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,16	Dinas PUTR dan Perkim	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1,88	Dinas PUTR dan Perkim	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpakecelakaan konstruksi	100,00	Dinas PUTR dan Perkim	
		Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00	Dinas PUTR dan Perkim	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,00	Dinas PUTR dan Perkim	Surat Keterangan
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	0,00	Dinas PUTR dan Perkim	Surat Keterangan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,49	Dinas PUTR dan Perkim	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20,15	Dinas PUTR dan Perkim	
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	21,28	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	BPBD	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	0,08	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	BPBD	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100,00	BPBD	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,04	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	
5	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	98,70	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00	Dinas Sosial	
6	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70,00	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,31		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4542,39	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	22,22	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	0,82	Dinas Tenaga Kerja	
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	41,42	DPMDPPKBPPP A	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00	DPMDPPKBPPP A	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10,92	DPMDPPKBPPP A	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

8	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	316,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
9	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	76,45	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0,00	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	91,13	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	25,50	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0,00	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
10	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	76,65	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	87,13	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,37	Dinas Dukcapil	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	53,58	Dinas Dukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	98,21	Dinas Dukcapil	
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50,00	Dinas Dukcapil	
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0,00	DPMDPPKBPPP A	Surat Keterangan
		Persentase peningkatan status desa Mandiri	0,00	DPMDPPKBPPP A	Surat Keterangan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,52	DPMDPPKBPPP A	
	Berencana				
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,98	DPMDPPKBPPP A	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,76	DPMDPPKBPPP A	
14	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	77,5	Dinas Perhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,43	Dinas Perhubungan	
15	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	Dinas Kominfo-SP	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	86,05	Dinas Kominfo-SP	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	79,01	Dinas Kominfo-SP	
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	63,46	Diskumdag	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1,27	Diskumdag	
17	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	9,5	DPMPPTSP	
18	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,89	Disparpora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9,18	Disparpora	
		Peningkatan prestasi olahraga	1,00	Disparpora	
19	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	Dinas Kominfo-SP	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	Dinas Kominfo-SP	
20	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	34,88	Dinas Kominfo-SP	
21	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

22	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	84,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
23	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	98,01	Dinas Perikanan	
25	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	79,08	Disparpora	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3,42	Disparpora	
		Tingkat hunian akomodasi	12,00	Disparpora	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,12	Disparpora	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,35	Disparpora	
26	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per Tahun	533,29	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-76,09	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
27	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	17,24	Diskumdag	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	9,11	Diskumdag	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	100,00	Diskumdag	
28	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	7,12	Diskumdag	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	107,68	Diskumdag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	Diskumdag	Surat Keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	Diskumdag	Surat Keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0,00	Diskumdag	Surat Keterangan
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100,00	Diskumdag	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dantenaga kesehatan	23,18	Badan Keuangandan Aset Daerah	
		Rasio PAD	12,63	Badan Keuangandan Aset Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP)	3,00	Hasil dari penilaianBPKP	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum(dikurangi transfer expenditures)	70,22	Badan Keuangandan AsetDaerah	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

		Opini Laporan Keuangan	9,00	Opini WTP dari BPK	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	57,62	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	20,50	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	2,97	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77,28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27,24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	14,83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-8,45	Badan Keuangandan Aset Daerah	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,6909	Badan Keuangandan Aset Daerah	
		Manajemen Aset	4	Badan Keuangandan Aset Daerah	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	11,02	Badan Keuangandan Aset Daerah	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) &	89,05		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00	Badan Keuangandan Aset Daerah	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Barru memuat :

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.4
TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1. Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	70,83 Poin
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Indeks Kesehatan	77,26 Poin
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11,63 Juta Rupiah
2. Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	0,006 %
3. Mewujudkan Pengembangan Kemajuan Kebudayaan	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya Yang Terpelihara	9,09 Persen
4. Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	3,881 Poin



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
5. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Strategis Terhadap PDRB	52,97 Persen
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,20 Poin
6. Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat Dan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14 Persen
		Angka Kemiskinan	8,20 Persen
7. Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Nilai SAKIP	70 Poin
		Indeks Pelayanan Publik	4 Poin
8. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram, Tertib, Dan Aman Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Agama	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma, Hukum Dan Ideologi Kebangsaan Pada Masyarakat	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir	0.001 Poin

2.3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TABEL 2.5
PENGUKURAN KINERJA DALAM PERJANJIAN
KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Visi	Kabupaten Barru Yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dan Bernafaskan Keagamaan				
Misi 1	Mewujudkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Pelayanan Dasar Lainnya				
Meningkatkan Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	73,80 Poin	74,51 Poin	100,96%
	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	70,83 Poin	67,19 Poin	94,86%
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Indeks Kesehatan	77,26 Poin	81,15 Poin	105,03%
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11,63 Juta Rupiah	12,05 Juta Rupiah	103,61%
Misi 2	Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Serta Pengembangan Seni Budaya Lokal				
Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana		Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,75 Poin	0,51 Poin	68,00 Persen
	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	0,006 Persen	0,001 Persen	100,01 Persen
Mewujudkan Pengembangan Kemajuan Kebudayaan		Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12.73%	9,09 Persen	10 Persen	110,01 persen



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya Yang Terpelihara	12,70 Persen	37,08 persen	291,57 Persen
Misi 3	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Lokal				
Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur		Indeks Williamson	0,26 poin	0,26 Poin	100 Persen
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	3,881 Poin	3,990 Poin	102,81 Persen
Misi 4	Meningkatkan Daya Saing Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan				
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	6,64 Persen	4,92 Persen	74,10 Persen
	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Strategis Terhadap PDRB	52,97 Persen	61,80 Persen	116,67 Persen
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,20 Poin	76,65 Poin	98,02 Persen
Misi 5	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan Antar Wilayah Dan Penanggulangan Kemiskinan				
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat Dan Angka Kemiskinan		Indeks Gini	0,34 Poin	0,34 Poin	99,98 Persen



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14 Persen	6,42 Persen	98,65 Persen
		Angka Kemiskinan	8,20 Persen	8,31 Persen	97,96 Persen
Misi 6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Governance Serta Layanan Publik Yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi				
Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	73 Poin	68,28 Poin	93,53 Persen
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Nilai SAKIP	70 Poin	61,42 Poin	87,74 Persen
		Indeks Pelayanan Publik	4,00 Poin	3,47 Poin	86,75 Persen
Misi 7	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama				
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenang, Tertib, Dan Aman Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Agama		Angka Kriminalitas	5,9 Per 10.000 Penduduk	4,04 Per 10.000 Penduduk	101,98 Persen
	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma, Hukum Dan Ideologi Kebangsaan Pada Masyarakat	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir	0,001 Poin	0,0003 Poin	100 Persen

2.3.3 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dan baseline tahun 2022 diperlukan untuk mengetahui



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

peningkatan kinerja yang ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.6
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN
TAHUN SEBELUMNYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,94	70,28	70,83	66,3	67,19	94,34	94,86
Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Indeks Kesehatan	76,69	76,93	77,26	80,88	81,15	105,13	105,03
Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,12	11,35	11,63	11,71 2	12,05	103,19	103,61
Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah/ Indeks ketahanan daerah terhadap bencana	0,69	0,72	0,74	0,54	0,51	75	68,00
Terwujudnya penguatan seni budaya dan kearifan lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	9,52	11,11	12,70	15,75	37,08	141,76	291,57
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	3,82	3,874	3,881	2,990	3,990	77,18	102,81
Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Strategis Terhadap PDRB	51,94	52,52	52,97	49,26	61,80	93,79	116,67
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,04	74	78,13	74,26	76,65	103,97	98,02



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,88	5,31	5,14	5,89	6,42	89,08	98,65
	Angka Kemiskinan	7,45	6,67	8,20	8,46	8,31	73,16	97,96
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Nilai SAKIP	55,52	65	70	60,04	61,42	92	87,74
	Indeks Pelayanan Publik	3,27	3,7	4	4,21	3,47	113,67	86,75
Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma, Hukum Dan Ideologi Kebangsaan Pada Masyarakat	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir	0,002	0,001	0,001	0,02	0,0003	- 1800%	100

2.3.4 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan target RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TABEL 2.7
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DIBANDINGKAN
TARGET RPJMD TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah 2026	Realisasi Kinerja 2024	CAPAIAN
			4	5	
1	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	71,78	67,19	93,61
2	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Indeks Kesehatan	77,93	81,15	104,13
3	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	12,02	12,05	100,25
4	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah/ Indeks ketahanan daerah terhadap bencana	0,80	0,51	63,75
5	Terwujudnya penguatan seni budaya dan kearifan local	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	15,87	37,08	233,65
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	3,901	3,990	102,28
7	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Strategis Terhadap PDRB	53,86	61,80	114,74
8	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45	6,42	97,94
		Angka Kemiskinan	6,05	8,31	97,59



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2026	2024	
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Nilai SAKIP	80	61,42	76,78
		Indeks Pelayanan Publik	4,25	3,47	81,65
10	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma, Hukum Dan Ideologi Kebangsaan Pada Masyarakat	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir	0	0,0003	100

2.3.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.8

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi (un audit)	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	70,28 Poin	66,3 Poin	94,34%	73.652.219.260	55.953.206.899	75,97	99,20
Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Indeks Kesehatan	76,93 Poin	80,88 Poin	105,13%	88.619.527.331	82.322.387.526	92,89	99,12
Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,35 Juta	11,712 Juta	103,19%	2.072.230.500	1.242.431.196	59,96	99,42



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Persentase Penurunan Korban Meninggal dan Hilang Karena Bencana	0,006	0,001	100,01	4.662.839.380	2.972.591.498	63,75	99,36
Terwujudnya penguatan seni budaya dan kearifan local	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	11,11	15,75	141,76 %	1.712.481.500	1.528.222.557	89,24	99,69
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	3,874	2,990	77,18%	63.053.783.817	53.210.556.332	84,39%	17,27%
Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Strategis Terhadap PDRB	52,52	49,26	93,79	14.649.561.290	13.483.899.613	92,04%	21,22%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi (unaudit)	Capaian	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	78,20	76,65	98,02	4.231.834.365	4.172.529.773	98,60%
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,31%	5,89%	89,08%	3.339.292.295	3.160.160.150	94,64	4,07
	Angka Kemiskinan	6,67%	8,46%	73,16%	148.321.858.104	122.087.544.724	82,31	15,97
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang	Nilai SAKIP	65 Poin	60,04 Poin	92%	107.857.890.871	105.417.679.174	97,74	98,89%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Indeks Pelayanan Publik	3,7 Poin	4,21 Poin	113,67%	362.088 .500	348.532.3 00	96,26	98,89%
Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma- Norma, Hukum Dan Ideologi Kebangsaan Pada Masyarakat	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir	0,001	0,020	-1800%	15.419. 635.820	15.149.96 4.189	98,25	101,96 %



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan skema Tugas Pembantuan, hal tersebut dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat sehingga perlu untuk dilakukan pendegelasan tugas kepada daerah otonom.

Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah dan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut.

Sebagai Konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum



Negara) berupa daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pengertian Tugas Pembantuan pada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 ini dijelaskan juga bahwa Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.



3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan di Kabupaten Barru dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. Perangkat Daerah diatas menerima Tugas Pembantuan dari

Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI yang sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah tersebut.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.

Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Barru diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Urusan Pertanian. Anggaran Tugas Pembantuan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sebesar Rp 5.935.600.000,-. Adapun Program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan yaitu:

Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

1. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
2. Pengeloaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian.

Program dukungan manajemen

1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya prasarana dan sarana pertanian



3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. Target Kinerja

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru target Program/ kegiatannya serta target anggarannya sebagai berikut :

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas target program/kegiatannya Tersedianya Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas atau 100% sedangkan target anggarannya Rp 5.890.000.000,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp 5.890.000.000,- jadi target anggarannya 100%; dengan rincian target kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 5.880.000.000,- dengan target sebesar Rp 5.880.000.000,- atau 100%;
- b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian sebesar Rp 10.000.000,- dengan target sebesar Rp 10.000.000,- atau 100%;

Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya prasarana dan sarana pertanian

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen PSP, dengan anggaran sebesar Rp 45.600.000,- dengan target sebesar Rp 45.600.000,- atau 100%.



3.3.2 Realisasi

1. *Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.*

Pada Dinas Pertanian Kabupaten realisasi Program/kegiatannya serta realisasi anggarannya sebagai berikut :

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas realisasi program/kegiatannya yaitu Tersedianya Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sedangkan realisasi anggarannya Rp 5.884.200.000,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp 5.890.000.000,- jadi realisasi anggarannya 99,90%; Adapun rincian dari realisasi per kegiatannya yaitu :

- a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 5.880.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.874.200.000,- atau 99,90%;
- b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau 100%;

Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya prasarana dan sarana pertanian

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen PSP, dengan anggaran sebesar Rp 45.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 45.600.000,- atau 100%.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru Urusan Pertanian dapat dilihat pada table berikut:



TABEL 3.1

**LAPORAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2024 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BARRU**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
		JUMLAH	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
	ANGGARAN DIPA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2024	5.935.600.000	5.929.800.000	99,90	100
I	PROGRAM KETERSEDIAA N, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	5.890.000.000	5.884.200.000	99,90	100
1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	5.880.000.000	5.874.200.000	99,90	100
2	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	10.000.000	10.000.000	100	100
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	45.600.000	45.600.000	100	100
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP	45.600.000	45.600.000	100	100





Permasalahan :

- Keterbatasan kapasitas penyimpanan air dapat menyebabkan kekurangan air pada musim kemarau yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan tanaman.
- Kerusakan pada saluran irigasi, embung dan fasilitas irigasi pertanian lainnya.
- Kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi pertanian seperti menjaga dan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana pertanian yang diberikan.
- Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada petani.
- Kurangnya pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian.

3.6. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan. Adapun Saran dan Tindak Lanjut pada tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu :

- Peningkatan infrastruktur irigasi dapat meningkatkan efisiensi irigasi dan mengurangi kehilangan air.
- Perbaikan saluran irigasi dan embung pertanian dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dan Pembangunan embung pada kelompok tani secara bertahap dengan memperhatikan calon petani calon lokasi penerima.
- Peningkatan partisipasi petani dalam menjaga infrastruktur pertanian yang diberikan dengan memberikan pemahaman



efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pertanian melalui penyuluhan pertanian oleh penyuluh dan aparat setempat.

- Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dengan tetap mengikuti Petunjuk Teknis dan memperhatikan usulan Calon Petani dan Calon Lokasi melalui proposal serta melakukan monitoring terhadap kecocokan lokasi dan legalitas petani terutama harus masuk dalam database SIMLUHTAN sebagai salah satu ketentuan dalam pemberian bantuan kepada petani.
- Peningkatan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian sehingga tepat sasaran terpelihara dan dimanfaatkan untuk sebaik baiknya pengembangan pertanian yang menghasilkan produksi pertanian yang berkualitas.



BAB IV PENCAPAIAN SPM

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan terbagi dua jenjang pendidikan yaitu :

- 1) Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- 2) Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun

4.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TABEL 4.1
TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap tahun	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
		siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	a					
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.1.3 Hasil Capaian Urusan Pendidikan

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru sebagai berikut :

TABEL 4.2

HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2024

No	Jenis pelayanan dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)						Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)				Indeks Pencapaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia	Capaian	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 %	6.113	5.622	91,97	Jumlah barang, jasa dan sumber daya	100 %	5.622	5.622	100%	91,97



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Jenis pelayanan dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					Indeks Pencapaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Capaian	
		n PAUD					manusia					
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	29.468	28.970	98,31	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	28.970	28.970	100%	98,31
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	2.303	1.674	72,69	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	1.674	1.674	100%	72,69

4.1.4 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersumber dari



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

APBD dan APBN. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.3
ANGGARAN TAHUN 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Alokasi Anggaran Program SPM Pendidikan	Rp. 75.728.261.586
2.	Total Belanja Langsung Disdikbud Kab. Barru	Rp. 308.489.829.999
3.	Persentase Alokasi	24,54 %

Adapun rincian anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

TABEL 4.4
RINCIAN ANGGARAN SPM URUSAN PENDIDIKAN 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Alokasi PAUD	Rp. 10.291.001.564,00	Rp. 10.107.141.970,00	98,21
2	Alokasi Pendidikan Dasar	Rp. 61.934.007.342,00	Rp. 55.752.964.371,00	90,01
3	Alokasi Pendidikan Kesetaraan	Rp. 3.503.252.680,00	Rp. 2.863.697.423,00	81,74

4.1.5 Dukungan Personil Urusan Pendidikan

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru digambarkan sebagai berikut :



TABEL. 4.5
DAFTAR PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARRU
BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	GOL	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
1.	GOL. IV	23	7	30
2.	GOL. III	8	13	21
3.	GOL. IX	1	0	1
4.	GOL. II	4	2	6
	JUMLAH	36	22	58

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

a. Permasalahan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
- 2) Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.



b. Solusi

Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.
- 2) Memperluas akses dan meningkatkan kualitas Pendidikan Kesenakertaan serta pemberian bantuan/beasiswa Paket A, B, dan C

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- 4) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
- 9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
- 10) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar



- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah Pelayanan antenatal yang diberikan kepada ibu hamil dengan standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan yakni satu kali trimester pertama, dua kali trimester kedua dan tiga kali trimester ketiga dengan standar kualitas yang memenuhi kriteria 10T dan pelayanan ultrasonografi. Tahun tahun 2023 jumlah sasaran ibu hamil 3436 dengan capaian 3064 (89%), pada tahun 2024 jumlah sasaran ibu hamil 2370 dengan capaian 2292 (70%).

Indikator ini turun jika dibandingkan tahun 2023. Cakupan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan ibu hamil K6 (kunjungan 6 kali 1,2,3) sesuai standar belum mencapai target disebabkan karena data proyeksi terlalu tinggi, kesalahan pengelola dalam menentukan jumlah sasaran, ada ibu hamil yang merupakan pendatang, hamil diluar nikah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah:

- a. Orientasi dan Edukasi Petugas untuk Pelayanan Catin di Puskesmas
- b. Pertemuan Pengkajian Audit Maternal BOK Kabupaten
- c. Pengadaan Stiker P4K
- d. Pelaksanaan Kelas ibu hamil
- e. Workshop Penguatan Jejaring & Pendamping Ibu Hamil Resiko Tinggi bagi Kader
- f. Pemantauan Bumil Resti



- g. Pemantauan Ibu Hamil Trimester III
- h. Pemantauan Ibu Hamil Yang Tidak Rutin Periksa Kehamilan
- i. Pemberian Suplement Zink penderita diare bagi bumil
- j. Sweeping Ibu Hamil Baru & Bumil Resti
- k. Kunjungan Rumah Bumil K4
- l. Pelacakan Bumil K1
- m. Pelayanan ANC di Posyandu
- n. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Posyandu
- o. Pendampingan calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K
- p. Skreening golongan darah, protein urine dan HB pada Ibu Hamil
- q. Sweeping Suntikan TT pada Ibu Hamil
- r. Pelacakan Pada Bumil Menjelang Persalinan
- s. Deteksi dini kehamilan pada pengantin baru
- t. Screening Hepatitis pada Ibu Hamil
- u. Pemeriksaan HIV dan shypilis pada ibu hamil

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah pelayanan persalinan yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi dengan persalinan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tim paling sedikit satu orang tenaga medis dan dua orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dengan mengacu pada acuan persalinan normal sesuai standar dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan untuk standar persalinan komplikasi. Tahun 2023 jumlah sasaran ibu bersalin 3245



dengan capaian 2772 (85%), tahun 2024 jumlah sasaran ibu bersalin 3251 dengan capaian 2379 (73%). Permasalahan dikarenakan ada ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh tenaga kesehatan dan diluar faskes, ada ibu yang bersalin ke daerah lain, kendala biaya dan sosial budaya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Antenatal Care (ANC)
 - b. Penguatan Manajemen Aktif Kala III kaitannya dengan pendarahan dalam proses persalinan
 - c. Rumah tunggu kelahiran
 - d. Pemantauan Ibu Nifas
 - e. Sweeping ibu nifas dan neonatus
 - f. kegiatan Rujukan Persalinan
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan standar kuantitas kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal yakni kunjungan neonatal 1 (KN1), Kunjungan neonatal 2 (KN2), kunjungan neonatal 3 (KN3) dengan standar kualitas perawatan neonatal esensial saat lahir dan setelah lahir. Pada tahun 2023 jumlah sasaran bayi baru lahir 3096 dengan capaian 2705 (87%). Tahun 2024 jumlah sasaran Bayi Baru Lahir 3091 dengan capaian 2342 (76%) . Indikator ini menurun capaiannya dibanding tahun sebelumnya ini disebabkan karena sebagian ibu yang datang melahirkan kemudian kembali ke daerah dimana suami bekerja, kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir, akses ke fasyankes sulit serta sosial budaya.



Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah:

- a. Pemeriksaan neonatus atau pelayanan kesehatan bayi baru lahir/neonatal
- b. Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
- c. Orientasi Konselor ASI bagi Petugas Tkt. Kabupaten
- d. Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak Tkt. Kabupaten
- e. Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi
- f. Pemantauan bayi 9-15 bulan ibu reaktif hepatitis
- g. Pemantauan Neonatus & Neonatus Risti
- h. Pelacakan audit maternal/perinatal bayi/balita
- i. Pemantauan Bayi Resti

4. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit yang dimaksudkan untuk pemantauan tumbuh kembang anak balita. Tahun 2023 jumlah sasaran balita 13413 dengan capaian 10327 (77%), tahun 2024 jumlah sasaran balita 15177 dengan capaian 12506 (82%). Capaian Indikator meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan balita adalah:

- a. Pelaksanaan SDIDTK pada balita
- b. Pelaksanaan kelas ibu balita
- c. Penimbangan Rutin Bayi Balita di Posyandu
- d. Sweeping kegiatan SDIDTKA di Posyandu
- e. Pemeriksaan gigi dan Mulut di TK/PAUD



- f. Pelacakan Balita Yang tidak datang ke Posyandu dan yang tidak terdeteksi pertumbuhannya
- g. Pemberian PMT penyuluhan
- h. Sweping Vitamin A
- i. Pelaksanaan pelayanan Imunisasi dasar di posyandu

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai dengan standar meliputi skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan dan pemberian imunisasi campak rubella, DT, td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara. Pada tahun 2023 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 7246 dengan capaian 6397 (88%), tahun 2024 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 26779 dengan capaian 26400 (99%). Indikator ini sudah meningkat dari tahun sebelumnya karena setiap anak pada usia pendidikan dasar sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah:

- a. Pelatihan dokter kecil
- b. Demonstrasi CTPS dan sikat gigi bersama di sekolah
- c. Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah
- d. Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
- e. Penyuluhan Kespro Remaja
- f. Pertemuan Tekhnis Penjaringan Anak Sekolah
- g. Pembinaan UKS dan kader kesehatan anak sekolah
- h. Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah



- i. Pemberian tablet Fe pada remaja putri
- j. Pemeriksaan berkala peserta didik
- k. Penyuluhan PHBS dan CTPS pada anak Sekolah Dasar
- l. Sweping pemberian tablet Fe pada remaja putri
- m. Pembinaan Kantin Sehat
- n. Pembinaan PKPR di sekolah
- o. Pemberian imunisasi BIAS

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar meliputi edukasi kesehatan tentang penyakit menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta calon pengantin, skrining status imunisasi tetanus bagi WUS usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi td dan pelayanan KB. Tahun 2023 jumlah sasaran 120204 dengan capaian 105912 (88%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 122436 dengan capaian 114365 (93%). Capaian Indikator mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum mencapai 100% dikarenakan kegiatan pelayanan skrining kesehatan sebahagian tidak terlaksana akibat dari SDM yang multifungsi dalam hal ini bekerja rangkap serta masih kurangnya masyarakat yang datang ke posbindu dan masyarakat yang berkunjung kadang adalah pasien yang datang berulang.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia produktif adalah:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut
- b. Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun.



- c. Pengukuran tekanan darah
- d. Pemeriksaan gula darah
- e. Pengukuran LILA
- f. Pemeriksaan Hb
- g. Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
- h. Pemeriksaan SADANIS dan IVA
- i. Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa
- j. Status imunisasi TT bagi calon pengantin

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia 60 tahun ke atas sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko pada usia lanjut. Tahun 2023 jumlah sasaran 21069 dengan capaian 15574 (48%), tahun 2024 jumlah sasaran 22199 dengan capaian 15474 (70%). Capaian Indikator melebihi dari tahun sebelumnya tapi belum mencapai target disebabkan karena terbatasnya petugas dalam memberikan pelayanan dan belum optimalnya sosialisasi terkait pelayanan kesehatan lansia dan masih terbatasnya sarana pemeriksaan kesehatan lansia di semua sarana pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia adalah:

- a. Penguatan Pelayanan Posyandu Lansia
- b. Penguatan Petugas tentang Puskesmas Santun Lansia
- c. Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu
- d. Kunjungan pelayanan homecare lansia resti



- e. Screening IVA
- f. Penimbangan BB, Pengukuran TB dan pemeriksaan TD pada lansia
- g. Screening Penyakit Akibat Gangguan Kognitif, Degeneratif dan Mental Emosional
- h. Kunjungan kader posyandu lansia
- i. pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- j. anamnesis perilaku berisiko

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah, Pelayanan edukasi non farmakologi, Pelayanan farmakologi dan Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 48784 dengan capaian 31174 (76%), tahun 2024 jumlah sasaran 49979 dengan capaian 44431 (89%). Indikator mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kegiatan pelayanan skrining kesehatan sebahagian tidak terlaksana akibat dari SDM yang multifungsi dalam hal ini bekerja rangkap, ketersediaan BMHP masih kurang, keterbatasan alat (tensimeter) karena rusak dan hilang serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke FKTP secara berkala.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan hipertensi adalah:

- a. Pemantauan Kegiatan Pelayanan Hipertensi di Posbindu
- b. Pendampingan Penderita Hipertensi melalui kunjungan rumah



- c. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi berbasis Web
- d. Workshop Program Informasi Posbindu PTM bagi petugas Puskesmas
- e. Pengukuran tekanan darah
- f. Pelayanan edukasi non farmakologi
- g. Pelayanan farmakologi
- h. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) dan terapi farmakologi. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 3058 dengan capaian 3539 (116%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 3134 dengan capaian 3510 (112%). Indikator pelayanan kesehatan penderita diabetes militus telah melebihi target. Hal ini dikarenakan sudah ada kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke FKTP secara berkala dan ketersediaan alat.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- a. Pelatihan Tekhnis Faktor resiko DM Secara Mandiri dan Berkelanjutan bagi petugas Puskesmas
- b. Pendampingan Penderita PTM (Diabetes Melitus) melalui kunjungan rumah
- c. Pemeriksaan klinis



- d. Pemeriksaan penunjang
- e. Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)
- f. Terapi farmakologi

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODJG berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 437 dengan capaian 455 (104%), tahun 2024 jumlah sasaran 439 dengan capaian 446 (102%). Indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sudah melampaui target ini dikarenakan kegiatan pelacakan atau skrining kasus ODGJ berat sudah terlaksana dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- a. Pemeriksaan kesehatan jiwa
- b. Edukasi
- c. Tata laksana

11. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar adalah pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 3076 dengan capaian 2996 (97%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 5103 dengan capaian 3669 (72%) . Indikator pelayanan kesehatan orang terduga TBC mengalami penurunan dari tahun



sebelumnya karena pasien dengan gejala batuk masih malu-malu berobat ke fasilitas kesehatan dan keterbatasan alat catridge TCM.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang terduga TBC adalah:

- a. Mapping Up dan Validasi Kasus TB
 - b. Workshop Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)
 - c. Ketuk Pintu TB Day
 - d. Penjaringan Suspek TB
 - e. Pelacakan Tb Kusta Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - f. Gerakan Serentak Penemuan Kasus Atau Deteksi Dini Penderita TB/Suspec TB
 - g. Pengambilan Specimen Pada Penderita Suspec TB
 - h. Pemeriksaan Kontak Serumah Penderita TB
 - i. pemantauan kepatuhan minum obat pasien TB Paru
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining. Pada tahun 2023 jumlah sasaran 3760 dengan capaian 3191 (85%), pada tahun 2024 jumlah sasaran 3743 dengan capaian 2650 (71%). Capaian indikator turun dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan penanganan kelompok resiko tinggi (high risk group) tidak maksimal, selain itu keterbatasan tenaga puskesmas yang harus menjangkau semua orang yang beresiko HIV termasuk



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

penjajaseks, transgender dan pengguna napza suntik dan sering terjadi roling petugas di Puskesmas serta adanya tugas rangkap.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah :

- Sosialisasi HIV Pada Populasi Kunci
- Pemantauan Triple Eliminasi HIV, Shipilis dan Hepatitis
- Pelacakan dan deteksi dini HIV/AIDS pada Ibu hamil di posyandu
- Screening HIV pada penderita TB
- Deteksi dini dan penemuan kasus HIV / AIDS
- Pemantauan dan tata laksana kasus HIV

4.2.3 Hasil Capaian Urusan Kesehatan

Realisasi kegiatan penyelenggara urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai berikut:

TABEL 4.6

**CAPAIAN TARGET, DAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN KESEHATAN KAB.BARRU
TAHUN 2024**

NO	CAPAIAN 2024 (%)				CAPAIAN , TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM		
	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU		TARGET	PROGRAM KEGIATAN	TARGET NASIONAL (%)
1	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil	100	2024	70%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATA	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

						N MASYARAKAT /Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	100	2024	73%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	100	2024	76%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	100	2024	82%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

						UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
5	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Pendidikan dasar	100	2024	99%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	100	2024	93%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	100	2024	70%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

						UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	100	2024	89%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Mellitus	100	2024	112 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
10	Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ Berat	100	2024	102 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

						UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
11	Pelayanan Kesehatan Bagi orang terduga TBC	100	2024	72%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
12	Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita HIV	100	2024	71%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal untuk urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.7
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN
KESEHATAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2024

Provinsi		: SULAWESI SELATAN		
Kabupaten/Kota		: BARRU		
Periode		: Januari s/d Desember		
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3270	2292	70
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3251	2379	73
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3091	2342	76
4	Pelayanan Kesehatan Balita	15177	12506	82
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	26779	26400	99
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	122436	114365	93
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	22199	15474	70
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49979	44431	89
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3134	3510	112
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	439	446	102
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	5103	3669	72



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Provinsi		: SULAWESI SELATAN		
Kabupaten/Kota		: BARRU		
Periode		: Januari s/d Desember		
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran	Realisasi	%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3743	2650	71

4.2.4 Anggaran Urusan Kesehatan

Realisasi urusan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru adalah 5 (Lima) program dan 18 (Empat Belas) kegiatan 56 sub kegiatan. Di Dinas Kesehatan Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah sebesar **Rp 140.864.443.486,00,-** dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 135.458.535.540,80,-**

4.2.5 Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kesehatan Kabupaten Barru sebanyak 570 orang dengan Ketersediaan tenaga sebagai berikut:

TABEL 4.8
KETERSEDIAAN TENAGA AHLI KESEHATAN

No	Ketersediaan Tenaga	Jumlah
1.	Dokter Ahli	20
2.	Dokter Umum	26
3.	Dokter Gigi	13



No	Ketersediaan Tenaga	Jumlah
4.	Perawat	249
5.	Bidan	130
6.	Nutrisionis	30
7.	Kefarmasian	45
8.	Sanitarian	21
9.	PKIP	16
10.	ATLM	20
Jumlah		570

4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya sumber daya, anggaran dan logistik. Sumber daya manusia pelayanan masih belum memenuhi kompetensi pelayanan sehingga masih terdapat kendala khususnya dalam pemberian pelayanan, masih adanya tugas rangkap pegawai, perlunya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penerapan SPM serta pemenuhan logistik.

Solusi, mengikut sertakan personil untuk pada bimbingan teknis, serta pelatihan-pelatihan/diklat standarisasi pelayanan dalam pekerjaan, perlu pengangkatan tenaga perjanjian kerja, dan dukungan sumber daya logistik.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

SPM Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum di Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:



- a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota
- b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota

4.3.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pekerjaan Umum

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum pada kabupaten Barru sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota
Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses air minum layak pada tahun 2024 adalah 96,75 %
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota
Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses sanitasi layak pada tahun 2024 adalah 66,64%.

4.3.3 Hasil Capaian Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

TABEL 4.9

TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase warga negara yang memperoleh akses	97,75%	96,75%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

	Sistem Penyediaan Air Minum	air minum		
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	66,46%

4.3.4 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

TABEL 4.10

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEKERJAAN UMUM

N O	SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET FASILITAS I (UNIT)	REALISAS I FASILITAS I (UNIT)
1.	APBD SANITAS I	Rp 1.524.909.250	Rp 1.393.543.506	80	80
2.	APBD AIR MINUM	Rp 1.742.505.066	Rp 982.777.110	80	80

4.3.5 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum tidak terlepas dari Dukungan Personil sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Dukungan Personil



dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari PNS dan Non PNS yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

SMU	= 10 orang
D.3	= 2 orang
S.1	= 30 orang
S.2	= 13 orang
Total	= 55 orang

b. Berdasarkan pangkat dan golongan

Golongan IV	= 9 orang
Golongan III	= 37 orang
Golongan II	= 9 orang
Golongan I	= -
Total	= 55 orang

c. Berdasarkan jabatan structural

Eselon II	= 1 orang
Eselon III	= 6 orang
Eselon IV	= 2 orang
Total	= 9 orang

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

a) Kendala dan Permasalahan :



- Pendataan, sinkronisasi dan validasi data terkait jumlah rumah akses sanitasi dan Air Minum tidak terkoordinasikan dengan baik.
- Kerjasama atau koordinasi dengan pihak desa/kelurahan tentang gambaran sanitasi atau Air Minum atau data BNBA/NIK
- SDM yang masih minim terkait pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan)

b) Solusi :

- Melaksanakan survey sanitasi dan Air Minum secara detail (BNBA/NIK)
- Penganggaran untuk kegiatan pendataan, verifikasi, fasilitasi dan koordinasi terkait SPM Pekerjaan Umum
- Untuk memenuhi kebutuhan data, maka perlu dibentuk tim koordinasi atau Tim Satgas yang difasilitasi oleh Kabupaten dalam melakukan sinkronisasi dan validasi data.
- Forum POKJA PKP dilaksanakan secara rutin.
- Perlu dilaksanakan bimbingan teknis SPM Pekerjaan Umum (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan)

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

SPM Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar



Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat pada kabupaten Barru sebagai berikut:

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2023 adalah 100 %.

- b) Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi yang terkena relokasi program Pemerintah daerah 0 %.

4.4.3 Hasil Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Realisasi urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TABEL 4.11

TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%
2.	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	(100%)*

**Layanan ini ditutup karena belum di anggarakan di tahun 2023*



4.4.4 Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

TABEL 4.12

**ALOKASI ANGGARAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN**

NO	PENDANAAN	PAGU
1	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS PERUMAHAN RAKYAT)	111,291,455,958
2	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	1,518,924,280.00
	APBD	1,518,924,280.00
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1,518,924,280.00
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0

4.4.5 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat tidak terlepas dari Dukungan Personil sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Dukungan Personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari PNS dan Non PNS Dari Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas PUTR-PERKIM yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) PNS : 4 Orang
- b) Non PNS :



Staf Honorer : 3 Orang

Dalam mendukung Pelaksanaan Kegiatan di dukung Oleh Tim Satgas Rumah Bencana 8 Orang dan 2 orang Tenaga Fasilitator Lapangan.

4.4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

a. Kendala dan Permasalahan :

- Keterbatasan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- Penganggaran belum mengcover seluruh kegiatan dalam program urusan SPM Perumahan rakyat;
- Pendataan, sinkronisasi, dan validasi data terkait jumlah rumah yang terkena dampak bencana tidak terkoordinasikan dengan baik
- Pemerintah kabupaten Barru tidak memiliki program yang untuk memfasilitasi relokasi rumah

b. Solusi :

- Perlu dilakukan langkah percepatan dan tepat untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan
- Penganggaran untuk kegiatan pendataan, verifikasi, fasilitasi dan koordinasi terkait SPM Perumahan Rakyat.



- Untuk memenuhi kebutuhan data, maka perlu dibentuk tim kordinasi atau Tim Satgas yang difasilitasi oleh Kabupaten dalam melakukan sinkronisasi dan validasi data.
- Forum komunikasi dan koordinasi dalam penyediaan dan fasilitasi relokasi rumah terdampak atau rawan bencana.

4.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1 URUSAN SATPOL PP DAN DAMKAR

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Satpol PP dan Damkar

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Penegakan Perda/Perkada.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Satpol PP dan Damkar

Penerapan Standar Pelayanan minimal di Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal tabel berikut:



TABEL 4.13

TARGET PENCAPAIAN SPM

SATPOL PP DAMKAR DAN PENYELAMATAN

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	target
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	100%
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %

4.5.1.3 Hasil Capaian Urusan Satpol PP dan Damkar

Dalam realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100 %



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota mencapai 100 %
- c. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100 %.

Adapun realisasi / capaian Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel selanjutnya :

TABEL 4.14

REALIASI SUB KEGIATAN SATPOL PP - DAMKAR

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian	Realisasi	
1.	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Kasus	100 %
			- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	6 Kasus	100 %
			- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
			- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	900 Laporan	100 %



4.5.1.4 Anggaran Urusan Satpol PP dan Damkar

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang terdiri dari belanja langsung sebanyak 3 Program 8 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp 7.505.469.280,-** dan dapat terealisasi pada triwulan IV sebesar **Rp. 7.244.943.905,-** atau **96,53 %** persen.

4.5.1.5 Dukungan Personil Urusan Satpol PP dan Damkar

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

- Pegawai Struktural

SD	=	1 Orang
SMU	=	27 Orang
Diploma	=	1 Orang
S1	=	23 Orang
S2	=	4 Orang
Jumlah	=	55 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

- Pegawai Struktural

Golongan IV	=	4 Orang
Golongan III	=	23 Orang
Golongan II	=	30 Orang
Golongan I	=	1 Orang
Jumlah	=	55 Orang

3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	4 Orang
Eselon IV	=	8 Orang



Jumlah = 13 Orang

4. Jabatan Fungsional

Fungsional pp pertama = 4 Orang

4.5.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Satpol PP dan Damkar

Permasalahan:

1. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran serta operasional yang belum memadai;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
3. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada rencana matriks kegiatan dan masih bertumpuk pada akhir anggaran
4. Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja
5. Belum terukurnya dengan jelas tingkat capaian kinerja yang dicapai (output/outcome kegiatan tidak jelas/tidak terukur) dalam penyusunan anggaran dan masih monoton.

Solusi

1. Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana operasional kegiatan
2. Perlunya penempatan personil sesuai dengan beban kerja
3. Perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi
4. Mengedepankan fungsi koordinasi dalam menyusun rencana kerja
5. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja
6. Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional transtibum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan



7. Perlunya penambahan personil Satpol PP, Damkar Dan Penyelamatan yang profesional.

4.5.2 URUSAN BPBD

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan BPBD

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan BPBD

Penerapan Standar Pelayanan minimal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal table berikut:

TABEL 4.15

TARGET PENCAPAIAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah



4.5.2.3 Hasil Capaian Urusan BPBD

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana mencapai 100%.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100%.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 100%.

Adapun realisasi / capaian Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel selanjutnya :

TABEL 4.16
CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Capaian / realisasi		
1	Pelayanan informasi rawan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	125 orang	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 Kawasan	100 %
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Laporan	100 %



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Capaian / realisasi		
			Kabupaten/Kota		
		bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 kawasan	100 %
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	25 orang	100 %
			Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	100 %
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30 ORANG	100 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100 %
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	355 Orang	102, 82%
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi korban Bencana Kabupaten/Kota	150 Orang	120 %
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	100 %



4.5.2.4 Alokasi Anggaran Urusan BPBD

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari belanja langsung sebanyak 2 Program dan 8 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar dimana BPBD Kabupaten Barru telah menetapkan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 3.249.992.739,00** direalisasikan sebesar **Rp 3.159.399.904,00** dipresentasikan sebesar **97,21%**.

4.5.2.5 Dukungan Personil Urusan BPBD

Sumber daya BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sarana dan prasarana yang ada. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Kabupaten Barru sampai Desember 2024 berjumlah 19 orang. Tim Reaksi Cepat (TRC) 25 orang dan Tenaga Sukarela 5 orang.

TABEL 4.17

**SUMBER DAYA MANUSIA BPBD KABUPATEN BARRU TAHUN
2024**

No .	Eselon /Non Eselon	Pendidikan					Golongan					NO N ASN	Jenis Kelami n	
		S 2	S 1	D 3	SLT A	I V	III	I I	I I	I X	P		L	
1	II	1				1							1	
2	III	1	3			3	1						4	
3	IV	1	2				3					2	1	
4	NON ESELON		2		3		3	2				3	2	
5	JABATAN FUNGSIONA L		4				4					1	3	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

6	PPPK	2					2					1	1
7	TRC	10	1	14						25	6	19	
8	TENAGA SUKARELA	2	2	1						5	3	2	
	Jumlah	3	23	3	20	4	1 1	2	0	2	30	16	33

4.5.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan BPBD

Kendala Pengambilan data Form. SPM yang membutuhkan waktu yang lama karena memulai persuratan dan juga berita acara.

Beberapa permasalahan yang dihadapi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten barru dalam penerapan SPM urusan bencana :

1. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran serta operasional yang belum memadai;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada rencana matriks kegiatan dan masih bertumpuk pada akhir anggaran;
4. Belum seimbangny antara jumlah aparat dengan volume kerja.
5. Belum terukurnya dengan jelas tingkat capaian kinerja yang dicapai (output/outcome kegiatan tidak jelas/tidak terukur) dalam penyusunan anggaran dan masih monoton.

Berdasarkan masalah yang disebutkan terdapat beberapa solusi yang dilakukan yaitu:

1. Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanggulangan bencana
2. Perlunya penempatan personil sesuai dengan beban kerja
3. Perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi



4. Mengedepankan fungsi koordinasi dalam menyusun rencana kerja
5. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja
6. Perlunya penambahan personil dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang profesional.
7. Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana operasional kegiatan.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dalam 5 (lima) indikator pelayanan dasar yang akan dicapai secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan Kabupaten Barru memiliki korelasi yang sangat jelas dengan 5 (lima) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap, yang meliputi:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota



4.6.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Sosial

TABEL 4.18

TARGET SPM URUSAN SOSIAL

No.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Instansi Sosial
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Instansi Sosial
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Instansi Sosial
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2024	Dinas/ Instansi Sosial
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten /Kota	100	2024	Dinas/ Instansi Sosial



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

4.6.3 Hasil Capaian Urusan Sosial Urusan Sosial

TABEL 4.19

HASIL CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN DASAR	CARA PERHITUNGAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI(%)	
1.	Program Rehabilitasi Sosial :				
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	$\frac{15}{15} \times 100\%$	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya di Luar Panti.	100	
	b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	$\frac{5}{5} \times 100\%$	2. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di Luar Panti.	100	
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	$\frac{5}{5} \times 100\%$	3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	100	
	d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	$\frac{15}{15} \times 100\%$	4. Persentase (%) Gelandangan dan Pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	
2.	Program Perlindungan dan Jaminan sosial : a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	$\frac{40}{40} \times 100\%$	5. Presentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Prov.	100	



4.6.4 Anggaran Urusan Sosial

Alokasi Anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barru di rinci

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024
1	ALOKASI ANGGARAN URUSAN SOSIAL	Rp 284.482.700,-
2	TOTAL BELANJA LANGSUNG	Rp 2.801.394.000,-
3	PRESENTASI ALOKASI	10,15 %

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2024 di Dinas Sosial Kabupaten Barru :

1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 75.836.050
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 14.047.750
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 14.047.750
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 78.806.150
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Rp 101.745.000

4.6.5 Dukungan Personil Urusan Sosial

Capaian SPM Bidang Urusan Sosial tidak terlepas dari Dukungan Personil sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Dukungan Personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari PNS dan Non PNS yang rinciannya adalah sebagai berikut :

a. PNS : 22 Orang



b. Non PNS :

Staf Honorer	: 7 Orang
KSK	: 7 Orang
Tagana Aktif	: 10 Orang
Pendamping Anak	: 1 Orang

4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Tahun 2024 yang ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Kabupaten Barru, hal yang dapat disimpulkan secara umum bahwa dilihat dari aspek kuantitas capaian target sangat memuaskan, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator mutu layanan yang masih perlu dipenuhi agar kualitas pelayanan sosial melampaui standar pelayanan minimal.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam tahapan penerapan SPM bidang sosial yaitu:

1. Sulitnya berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penerapan SPM
2. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021
3. Masih terdapat refocusing anggaran pada Tahun 2024 sehingga daerah mengalami keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua indikator mutu layanan dasar dapat terpenuhi
4. Permasalahan teknis pada pengisian laporan SPM dalam



aplikasi e SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual di lapangan.

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, terdapat beberapa solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di daerah yaitu :

1. Melaksanakan pendataan 1 kali dalam 3 tahun dan pemutakhiran data setiap tahun terkait data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Mengusulkan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung dan memudahkan pelayanan bidang kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan SDM melalui bimbingan dan pelatihan teknis dalam rangka pemenuhan kompetensi minimal dalam rangka pelayanan penanganan PMKS sesuai SOP yang ditetapkan.
5. Dengan dibentuknya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk memudahkan PMKS mengakses berbagai layanan perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan



tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan SPM urusan Pendidikan Tahun 2024, sebagai berikut:

Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan Sub kegiatan:
 - 1.1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - 1.2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 1.3 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - 1.4 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - 1.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - 1.6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - 1.7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 1.8 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 1.9 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - 1.10 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - 1.11 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - 1.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
 - 1.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - 1.14 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sub kegiatan antara lain:
 - 2.1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU



- 2.2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 2.3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 2.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 2.6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 2.7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 2.8 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 2.9 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 2.10 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 2.11 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan
- 2.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 2.13 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama
- 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sub
kegiatan:
 - 3.1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 3.2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
 - 3.3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 3.4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan PAUD
 - 3.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - 3.6 Pembangunan Ruang Kelas Baru



4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, sub kegiatan:

4.1 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

4.7.2 PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESEHATAN

Program dan Kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pemenuhan SPM urusan kesehatan, antara lain:

TABEL 4.20

SPM URUSAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
6	Pelayanan Kesehatan Pada usia produktif	Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatk an skrening kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

4.7.3 PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

TABEL 4.21
URUSAN PEKERJAAN UMUM SPM

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	668.750.705	544.460.342
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.073.754.361	438.316.768
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Pembangunan Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Setempat	1.108.229.000	995.414.630



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	LIMBAH DOMESTIK	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	27.986.150	25.631.670
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	138.732.200	130.559.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	249.961.900	241.938.200

4.7.4 PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

TABEL 4.22
SPM PEKERJAAN UMUM

N O	PRO G RAM	KEG IA TAN	SUB KEGIAT AN	SATU AN	ANGARAN	REALISASI	PERSENT ASE
1	PROGRAM PENGEMBANGAN				1.590.670.580	1.532.649.509	96.35%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

N O	PRO G RAM	KEG IA TAN	SUB KEGIAT AN	SATU AN	ANGARAN	REALISASI	PERSENT ASE
	PERUMAHAN						
1		Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana			12.001.80 0	11.724.00 0	97,69 %
2		Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat			19.334.00 0	12.039.00 0	62,27 %
3		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarela wan Tanggap Bencana			20.604.00 0	16.819.00 0	81,63 %
4		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			19.806.50 0	19.606.50 0	98,99 %
5		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah			1.518.924. 280	1.472.461. 009	96,94 %



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

N O	PRO G RAM	KEG IA TAN	SUB KEGIAT AN	SATU AN	ANGARAN	REALISASI	PERSENT ASE
		bagi Korban Bencana					

4.7.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. SATPOL PP DAN DAMKAR

Pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan untuk diterapkan di daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini, tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM. Prinsip pengembangan dan penyelenggaraan program tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan program strategis bagi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah. adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1.1. Penyediaan jasa Surat Menyurat

1.1.2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- 1.1.3. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.1.4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.2.4. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.2.5. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
 - 1.2.6. Fasilitas dan kunjungan tamu
 - 1.2.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Meubel
 - 1.3.2. Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya
- 1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.4.2. Pemeliharaan Mebel
 - 1.4.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5.1.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



5.1.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.1.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Pencegahan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

2.1.2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

2.1.3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1.4. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1.5. Pengadaan dan Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

2.2.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota



2.2.2. Pengawasan Atas Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

2.2.3. Pengangan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

3. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.1. Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

3.1.3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

3.1.4. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

2. BPBD

Pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan untuk diterapkan di daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini, tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM. Prinsip pengembangan



dan penyelenggaraan program tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan program strategis bagi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah. adapun program dan kegiatan BPBD tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

2. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 4) Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana,

Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pemenuhan SPM urusan



ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

4.7.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Program kerja Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun 2024 tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut perlu disusun program dan kegiatan. Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Barru .Berikut rincian anggaran APBD Dinas Sosial Kabupaten Barru :

TABEL 4.23
ANGGARAN SPM URUSAN SOSIAL

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN SPM	PENANGGUNG JAWAB
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 182.737.200	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 182.737.200	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN SPM	PENANGGUNG JAWAB
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 255.442.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 101.745.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada dasarnya merupakan Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), Tugas Umum Pemerintahan maupun Tugas Pembantuan, serta Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019, maka setiap tahun Pemerintah Daerah di samping menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat untuk menilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Sehingga melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun 2024 ini,



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Pelaksanaan jalannya Pemerintahan, hingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini tidak luput dari berbagai kekurangan maupun kekeliruan, baik mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan maka dari itu kami haturkan permohonan maaf. Kritik serta saran yang konstruktif sangat diharapkan, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Barru dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk memenuhi pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Barru. Amin.

Barru, 26 Maret 2025

BUPATI BARRU



INA KARTIKA SARI



PEMERINTAH DAERAH
Kabupaten Barru